

**PERSETUJUAN KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL* DALAM
TRANSISI ENERGI TERBARUKAN OLEH REPUBLIK CEKO TAHUN**

2019

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

UMMU CHOLIFATUL LATIFAH

21323249

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PERSETUJUAN KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL* DALAM
TRANSISI ENERGI TERBARUKAN OLEH REPUBLIK CEKO TAHUN**

2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

UMMU CHOLIFATUL LATIFAH

21323249

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Persetujuan Kebijakan European Green Deal dalam Transisi Energi
Terbarukan oleh Republik Ceko Tahun 2019**
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.
- 3 Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int., M.A.
- 4 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

17 Oktober 2025



Ummu Cholifatul Latifah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>13</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>14</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2.....	16
KEBIJAKAN EUROPEAN GREEN DEAL 2019	16
2.1 European Green Deal (EGD).....	16
2.2 Tujuan European Green Deal yang Ingin Dicapai	19
<i>2.2.1 Tujuan Ekonomi European Green Deal.....</i>	<i>20</i>
<i>2.2.2 Tujuan Non-Ekonomi European Green Deal.....</i>	<i>25</i>
2.3 Penolakan EGD oleh Negara Anggota	26
BAB 3.....	29
PENETAPAN PIHAK LINKER DAN LINKEE DALAM EGD	29
3.1 Linker dan Linkee dalam Kebijakan EGD	29
3.1.1 Uni Eropa Sebagai Linker.....	29
3.1.2 Republik Ceko Sebagai Linkee	35
3.2 Tawaran yang Diberikan Linker.....	36
3.4 Aspek Win dan Loss Tiap Pihak	42

3.4.1 Aspek Win dan Loss Uni Eropa.....	42
3.4.2 Aspek Win dan Loss Republik Ceko	44
BAB 4.....	56
KESIMPULAN.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR SINGKATAN

EBT	: Energi Terbarukan
EEA	: <i>European Environment Agency</i>
EGD	: <i>European Green Deal</i>
EGDIP	: <i>European Green Deal Investment Plan</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
JTF	: <i>Just Transition Fund</i>
JTM	: <i>Just Transition Mechanism</i>
PLTN	: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
REACT-EU	: <i>Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe</i>
RRF	: <i>Recovery and Resilience Facility</i>
SEIP	: <i>Sustainable Europe Investment Plan</i>
TEU	: <i>Treaty on European Union</i>
TFEU	: <i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian NextGenerationEU	22
Tabel 2. Rincian Program NextGenerationEU.....	23
Tabel 3. 10 Negara yang Kehilangan Jumlah Pekerjaan Terbanyak	53
Tabel 4. Aspek Win dan Loss Uni Eropa dengan Republik Ceko	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. NextGenerationEU Green Bonds Framework.....	24
Gambar 2. Survei Dukungan Warga Republik Ceko Terhadap Energi Nuklir.....	47
Gambar 3. Peta Proyek Dalam Rencana Pemulihan dan Ketahanan di Republik Ceko	50

ABSTRAK

Pada tahun 2019, Uni Eropa telah merancang sebuah kebijakan *European Green Deal* (EGD) yang berisi tentang inisiatif kebijakan untuk jalur transisi hijau dengan tujuan akhir mencapai netralitas karbon di tahun 2050. Akan tetapi, dalam penetapan kebijakan EGD pada awalnya Republik Ceko menolak untuk menyetujuinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses persetujuan Republik Ceko dengan penawaran yang telah diberikan oleh Uni Eropa sehingga Republik Ceko turut andil dalam EGD dengan menggunakan *issue linkage* oleh Paul Poast. Argumen sementara penelitian menyatakan dengan menggunakan *issue linkage*, proses persetujuan terjadi dan berlangsung dengan cara menghubungkan dua isu yang berbeda yaitu isu lingkungan dengan isu ekonomi sehingga mendorong Republik Ceko untuk turut serta dalam menyetujui EGD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang berbasis literasi yang bersumber pada laman resmi, jurnal, dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadi adanya penolakan karena tantangan yang akan dihadapi oleh Republik Ceko jika menerapkan kebijakan EGD. Kemudian, persetujuan dapat terjadi karena adanya penawaran yang menguntungkan oleh kedua pihak.

Kata-kata kunci: *European Green Deal* (EGD), Uni Eropa, Republik Ceko, Issue Linkage, Netralitas Iklim.

ABSTRACT

In 2019, the European Union drafted a European Green Deal (EGD) policy containing policy initiatives for green transition with the ultimate goal of achieving carbon neutrality by 2050. However, when the EGD policy was first established, the Czech Republic refused to approve it. This research aims to analyse the Czech Republic's approval process with the offer by the European Union, so the Czech Republic participates in the EGD using issue linkage by Paul Poast. The provisional argument of the study states that by using issue linkage, the approval process occurs and takes place by linking two different issues, environmental issues and economic issues, thereby encouraging the Czech Republic to participate in EGD. This qualitative research relies on secondary data based on literature sourced from official websites, journals academic, and reports with verifiable sources. The findings reveal that the rejection was due to the challenges the Czech Republic faced if it were to implement the EGD policy. However, approval could be achieved due to the mutually beneficial offers made by both parties.

Keywords: European Green Deal (EGD), European Union, Czech Republic, Issue Linkage, Climate Neutrality.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama dua dekade terakhir, Uni Eropa mengalami peningkatan pada energi terbarukan (EBT) dan beberapa Negara Anggota memberikan tanggapan terhadap kebijakan iklim dan energi yang dapat menjadi target pada 2020 untuk sumber energi terbarukan, dan peningkatan daya saing dalam mengikuti kemajuan teknologi cepat dan pengurangan biaya signifikan. Berdasarkan *European Environment Agency* (EEA), jumlah dari energi terbarukan mencapai 18% dari penggunaan energi *final bruto* Uni Eropa pada tahun 2018, dua kali lipat lebih tinggi dari tahun 2015. Pertumbuhan yang meningkat membuat Uni Eropa lebih unggul daripada pertumbuhan kawasan lainnya. Pada tahun 2018, seluruh Negara Anggota Uni Eropa untuk sumber EBT digunakan sebagai pemanas sebesar 49%, pembangkit listrik sebesar 43%, dan pada transportasi sebesar 8%. Data-data tersebut berdasarkan perkiraan awal oleh EEA (Popov 2019).

Pada tahun 2019, Uni Eropa merancang dan meluncurkan sebuah kesepakatan yaitu *European Green Deal* (EGD) yang berisi tentang inisiatif kebijakan untuk jalur transisi hijau dengan tujuan akhir mencapai netralitas iklim di tahun 2050. Kebijakan EGD dibuat sebagai kontribusi Uni Eropa terhadap Perjanjian Paris yang telah diratifikasi Uni Eropa bersama negara-negaranya untuk menetapkan tujuan dalam menjaga pemanasan global dibandingkan dengan tingkat pra-industri pada tahun 2015. Kemudian, dalam kebijakan EGD ini menggarisbawahi keperluannya semua bidang kebijakan untuk berkontribusi langsung dalam memerangi perubahan iklim. Dalam kebijakan EGD memiliki

dukungan terhadap seluruh sektor di Uni Eropa yang meliputi energi, industri, transportasi, pertanian, keuangan berkelanjutan, dan sektor lain yang menjadi tujuan dari kebijakan EGD. Dengan kebijakan EGD, seluruh dari Parlemen Eropa mengangkat Undang-Undang yang telah mengubah visi strategi menjadi Undang-Undang dan aturan yang diterapkan di semua Negara Anggota Uni Eropa (*European Council* 2019).

Pada awalnya, kebijakan EGD akan direalisasikan sebagai strategi pertumbuhan domestik, kemudian EGD ditetapkan untuk mengambil peran penting dalam hal pembangunan dan kebijakan regional (Sandri et al. 2023). Area utama dari strategi kerangka kerja EGD meliputi: (1) Ambisi perubahan untuk 2030 dan 2050 yang berfokus pada pengurangan emisi karbon; (2) Energi bersih dan efisiensi transisi energi; (3) Strategi industri untuk ekonomi bersih dan sirkular; (4) Mobilitas cerdas dan berkelanjutan; (5) *Farm to Fork Strategy*; (6) Melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem; (7) Ambisi nol polusi untuk lingkungan bebas dari racun; dan (8) Mengutamakan keberlanjutan dalam semua kebijakan Uni Eropa termasuk perdagangan dan kebijakan luar negeri. Semua tujuan tersebut melibatkan kombinasi tindakan antara Uni Eropa dengan nasional atau domestik (Almeida et al. 2023).

Salah satu tujuan EGD adalah energi bersih dan efisiensi transisi energi. Penggunaan dan produksi gas rumah kaca di Uni Eropa lebih dari 75%. Oleh karena itu, pengurangan sistem energi sangat penting untuk mencapai tujuan iklim 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2050. Ada 3 fokus utama dalam transisi energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca: (1) Memastikan pasokan energi aman dan terjangkau; (2) Mengembangkan pasar energi yang terintegrasi penuh, saling

berhubungan, dan digitalisasi; dan (3) Memprioritaskan efisiensi energi, peningkatan kinerja energi yang berdasarkan pada sumber terbarukan. Selanjutnya salah satu dari tujuan utama komisi adalah untuk membangun sistem energi yang saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung sumber EBT (*European Commission* 2024).

Untuk melaksanakan tujuan EGD, diperlukannya dukungan dari Negara Anggota untuk mengimplementasikan dan berimplikasi kepada Negara Anggota. Dalam proses komitmen EGD, Negara-negara Anggota terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan, beberapa negara menyetujui dan beberapa negara tidak menyetujui karena adanya tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikannya. Beberapa negara yang menyetujui seperti Denmark, Swedia, dan Finlandia merupakan pelopor terhadap iklim yang mulai mengembangkan sumber EBT sebagai pembangkit listrik untuk mencapai tujuan netral karbon. Kemudian, Jerman sebagai negara pertama yang memulai untuk menghentikan penggunaan energi nuklir untuk mewujudkan EGD. Hal ini membuat negara-negara yang menjadi bagian terdepan dalam kebijakan tersebut akan memimpin dalam mengambil keuntungan dan memanfaatkan proses tersebut (Dennison, Loss, and Söderström 2021).

Meskipun demikian, masih ada beberapa negara yang menolak adanya kebijakan EGD dengan ambisinya untuk mencapai tujuan iklim 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2050. Salah satu negara yang menolak adalah Republik Ceko karena memiliki kekhawatiran dan tantangan kedepannya. Penerapan yang akan dilakukan secara langsung akan memberikan risiko dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, stabilitas infrastruktur, dan memberikan dampak terhadap

persaingan global terhadap lokal. Target yang tidak realistis menurut Republik Ceko akan memberikan dampak yang signifikan karena diperlukannya alokasi dana yang besar (Komunikace 2020). Tidak hanya itu, akan ada kemunculan tantangan dari sisi sosio-ekonomi terhadap Republik Ceko (Dennison, Loss, and Söderström 2021).

Tantangan yang muncul karena kekhawatiran Republik Ceko terlebih pada sosio-ekonomi seperti tingginya tingkat pengangguran karena penutupan industri karbon. Hal ini disebabkan karena penggunaan batubara masih menjadi bahan bakar utama yang digunakan sebagai sumber energi di Republik Ceko. Kemudian, penurunan standar kehidupan oleh Republik Ceko terhadap pengurangan barang-barang atau penggunaan listrik sebagai kehidupan sehari-hari akan menjadi tantangan yang akan dihadapi. Hal tersebut merupakan akibat dari tujuan yang tidak realistis dan dampak dari pengurangan penggunaan bahan bakar batubara. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kesepakatan EGD diperlukannya alokasi dana yang besar untuk membantu menutupi kesenjangan kapasitas tersebut (Dennison, Loss, and Söderström 2021).

Pada 12 Desember 2019, hasil kesimpulan dari pertemuan Dewan Eropa di Brussel sesuai dengan laporan EUCO 29/19 yang dilakukan bersama dengan para delegasi dari Negara Anggota salah satu poinnya menjelaskan bahwa Dewan Eropa mendesak Presiden untuk melanjutkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir (*European Council* 2019). Dalam 10 jam pembahasan terkait tujuan akhir netralitas karbon 2050, Republik Ceko dan Hungaria bergabung dalam EGD setelah mendapatkan jaminan terkait energi nuklir yang akan dimasukkan ke dalam bauran energi akhir (BBC 2019).

Beberapa bantuan diberikan untuk mencapai tujuan netralitas karbon tahun 2050 kepada negara yang terdampak seperti Republik Ceko yang masih menggunakan batubara sebagai sumber energi utama. Bantuan lainnya yang diberikan berupa investasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mencakup; infrastruktur energi dan transportasi, *district heating network*, langkah-langkah efisiensi energi, dan infrastruktur sosial. Dana bantuan dari anggaran Uni Eropa dengan total keseluruhan sekitar €25-30 miliar yang diharapkan dapat melakukan investasi untuk wilayah yang bersangkutan dan mobilisasi investasi tambahan akan didapatkan untuk proyek yang tidak menghasilkan aliran pendapatan memadai yang akan memenuhi syarat (*Council of the European Union* 2021).

Penerapan kebijakan EGD merupakan aksi dari langkah Uni Eropa terhadap komitmen untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Hal yang menjadi prioritas utama adalah aksi terhadap pengurangan *net-zero* emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 dengan pengurangan setidaknya sebesar 55% pada tahun 2030, dibandingkan dengan emisi pada tahun 1990; dan penanaman pohon tambahan di Uni Eropa sebanyak 3 miliar pohon pada tahun 2030 (Schunz 2022). Meskipun selama penerapan kebijakan EGD memunculkan *pro* dan *kontra*, terlebih Republik Ceko yang masih menggunakan bahan bakar fosil batubara sebagai sumber energi utama. Akan tetapi, pemerintah bersama Dewan Eropa berhasil membuat Republik Ceko menyetujui kebijakan EGD dengan tujuan iklim 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2050. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas kebijakan EGD terlebih pada sektor energi yaitu energi terbarukan dan bagaimana Uni Eropa berhasil mengajak Republik Ceko untuk menyetujui kebijakan tersebut pada tahun 2019 dengan pendekatan *issue linkage*.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Republik Ceko pada akhirnya menyetujui kebijakan European Green Deal (EGD) pada tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan secara detail terkait pihak *linker* dan *linkee* dalam kebijakan *European Green Deal* pada proses persetujuan oleh Republik Ceko;
2. Untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian Uni Eropa dalam memberikan penawaran kepada Republik Ceko; dan
3. Untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian Republik Ceko dalam menyetujui kebijakan *European Green Deal*.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang kebijakan *European Green Deal* yang diterapkan oleh Uni Eropa pada masing-masing Negara Anggotanya terlebih pada Republik Ceko. Di mana, penelitian ini akan memfokuskan pada kebijakan *European Green Deal* terkait energi bersih dan efisiensi transisi energi dengan fokus utama energi terbarukan (EBT). Pada penelitian ini akan membahas tentang kebijakan *European Green Deal* pada tahun 2019 yang merupakan awal dirancangnya dan diterapkannya pada setiap Negara Anggota yang telah menyetujui kebijakan tersebut. Kemudian, dalam penelitian ini juga akan

membahas bagaimana pada akhirnya Republik Ceko mulai menyetujui kebijakan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan bersama. Penelitian ini juga berfokus dari tahun 2019 karena tahun tersebut menjadi acuan pada Republik Ceko dalam menyetujui dan menerapkan kebijakan tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama ditulis oleh Fazıl Gökgöz dan Mustafa Taylan Güvercin yang berjudul “*Energy Security and Renewable Energy Efficiency in EU*”. Pada jurnal ini, menjelaskan bahwa energi merupakan inti dari tiap produksi yang harus dijamin pertumbuhan ekonomi bagi negara-negaranya. Berdasarkan *International Energy Agency*, ketahanan energi merupakan perolehan energi tanpa adanya gangguan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, berdasarkan *Asia Pacific Energy Research Centre* mengkategorikan 4 dimensi sebagai ketahanan energi yaitu (1) ketersediaan akses energi untuk meminimalisir ketergantungan impor energi; (2) aksesibilitas yang menjangkau termasuk dalam kendala geografis seperti tenaga kerja dan teknologi; (3) keterjangkauan yang mengacu kepada biaya; dan (4) penerimaan atas energi yang dikaitkan dengan adanya dampak terhadap lingkungan. 4 dimensi tersebut sebagai komponen dari kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keamanan energi yang mampu menuju energi bersama dengan serikat pekerja (Gökgöz and Güvercin 2018).

Penelitian kedua ditulis oleh Joan Hereu-Morales, Alba Segarra, dan César Valderrama yang berjudul “*The European (Green?) Deal: A Systematic Analysis of Environmental Sustainability*”. Pada jurnal ini, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 setelah menandatangani Perjanjian Paris dan *Sustainable Development*

Agenda untuk 2030, EGD menjadi kunci dari sektor ekonomi Eropa dalam *sustainable society* dan aksi dalam memerangi perubahan iklim. Penyajian EGD sebagai rencana dari publik untuk keberlanjutan dalam mencapai tujuan iklim pada Perjanjian Paris dan penanaman visi agenda keberlanjutan 2030 mencakup *sustainable development goals* (SDG). Pelaksanaan EGD merupakan evolusi untuk keberlanjutan di Uni Eropa yang memiliki fokus pada pertumbuhan pada sektor ekonomi. Kemudian, perencanaan dalam EGD banyak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan yang diperlukan untuk menghindari ketidakseimbangan dalam keberlanjutan kebijakan EGD (Hereu-Morales, Segarra, and Valderrama 2024).

Penelitian ketiga ditulis oleh Marinus Ossewaarde dan Roshnee Ossewaarde-Lowtoo yang berjudul “*The EU’s Green Deal: A Third Alternative to Green Growth and Degrowth?*”. Pada jurnal ini, menjelaskan bahwa EGD bersifat kompleks dan transformatif, tetapi juga melekat kepada pertumbuhan ekonomi hijau. Sebagian besar dari EGD merupakan kelanjutan dari pembaruan dari pertumbuhan ekonomi hijau yang menjadi alasan kenapa EGD ini dapat diterima dalam dunia usaha. Dalam hal ini, negosiator melihat adanya peluang terutama pada transisi energi, elektrifikasi mobil, dan subsidi negara dalam korporasi penghijauan kapitalisme. Kemudian, EGD ini dapat disebut sebagai model “pertumbuhan hijau kritis” karena kebijakan ini bukan sekadar rencana dalam pertumbuhan hijau tradisional dan juga bukan penurunan terhadap pertumbuhan untuk Negara Anggota Uni Eropa (Ossewaarde and Ossewaarde-Lowtoo 2020).

Berdasarkan hasil dari ketiga jurnal di atas menjelaskan mengenai penelitian tentang analisis EGD yang dikaitkan dengan pertumbuhan energi hijau dan

pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa. Selain itu, dari ketiga jurnal tersebut menjelaskan tentang kebijakan yang akan menjadi fokus dalam penerapan EGD di Uni Eropa. Pada penelitian pertama, dalam jurnal tersebut membahas tentang efisiensi antara EBT, ketahanan energi, dan kebijakan energi dari negara-negara Uni Eropa yang mampu mendorong negara untuk tujuan negara energi bersih. Pada penelitian kedua, membahas secara umum tentang sistematis kebijakan EGD dalam lingkungan keberlanjutan dan pembahasan secara menyeluruh dalam rangkuman singkat tentang fokus-fokus tujuan EGD. Kemudian pada penelitian ketiga, dalam jurnal tersebut membahas pertumbuhan ekonomi hijau secara spesifik terkait pertumbuhan atau kemunduran dari EGD, pembahasan terkait kemungkinan potensial dari kebijakan EGD terhadap kesejahteraan ekonominya.

Akan tetapi, dalam ketiga jurnal tersebut masih belum ada yang secara spesifik membahas kebijakan EGD yang merupakan tujuan energi bersih dari Uni Eropa. Kemudian, masih belum ada yang spesifik membahas mengapa Republik Ceko pada akhirnya menyetujui kebijakan tersebut dan mulai mengimplementasikan di negaranya. Selain itu, pembahasan dari ketiga jurnal tersebut rata-rata berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi dalam penerapan kebijakan EGD dan berbanding terbalik dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas hal yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang telah dipaparkan di atas dan akan spesifik membahas tentang kebijakan EGD dengan fokus pada transisi energi terbarukan. Kemudian, bagaimana pada akhirnya Republik Ceko mulai menyetujui kebijakan EGD dengan beberapa penawaran yang dilakukan Uni Eropa sehingga mendapatkan keuntungan bersama dengan menggunakan pendekatan teori *issue linkage*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan *issue linkage*. Menurut Poast (2013, 287), *issue linkage* adalah taktik negosiasi yang digunakan untuk mencapai dua tujuan: (1) Untuk menciptakan manfaat bagi pihak yang sebelumnya menolak kesepakatan dan (2) Mendorong negara-negara untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan. Contohnya seperti memasukkan ketentuan lain dalam kebijakan yang telah ditentukan untuk mendorong semua pihak dalam mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Penggabungan tersebut sebagai taktik negosiasi yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja sama.

Menurut Haas (1980, 372), ada 3 pendekatan dalam *issue linkage* yaitu:

1. *Tactical linkage*, pendekatan yang dilakukan dengan menggabungkan dua isu yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan *quid pro quo*¹ dengan keuntungan yang terpisah;
2. *Fragmented linkage*, isu yang menggabungkan dengan komitmen tujuan sosial yang utama dengan yang bertentangan. Pendekatan isu ini terbentuk dari ketidakpastian terhadap suatu hasil. Pada *fragmented linkage* tidak terdistribusikan secara merata dan kepentingan dalam mempertahankan tergantung dari hubungan antara tujuan, sebab dan akibat dari pihak yang terlibat; dan

¹ Sesuatu untuk sesuatu atau *give and take*

3. *Substantive linkage*, penggabungan isu yang didasarkan dengan pengetahuan intelektual terkait kesepakatan dengan tujuan sosial untuk mencapai keuntungan yang maksimal.

Dari penjelasan di atas, penggunaan *tactical linkage* menjadi pendekatan yang tepat di antara ketiga isu di atas untuk membahas proses penelitian ini. Hal ini karena pendekatan isu tersebut menghubungkan dua isu yang berbeda untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Penggunaan isu yang dilakukan ini tidak menimbulkan suatu masalah selama pencapaiannya tercapai. Sedangkan penggunaan *fragmented linkage* dan *substantive linkage* kurang sesuai untuk membahas penelitian ini karena pendekatan tersebut dengan pendekatan sosial dan tujuan rezim.

Selain itu, penggunaan *tactical linkage* dapat digunakan untuk menjawab dan menjelaskan dari rumusan masalah. Dapat dilihat dari tawaran yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam memberikan penawaran atau kompensasi kepada Republik Ceko untuk turut menyetujui kebijakan EGD. Dalam proses persetujuannya, Uni Eropa melibatkan antara isu lingkungan agar tercapai mencapai tujuan iklim 2030 dan netralitas karbon 2050, dan dengan isu ekonomi sebagai penawaran berupa pemberian investasi kepada Republik Ceko untuk mengimplementasikan kebijakan EGD.

Dalam menganalisis penelitian ini, terdapat dua aktor/pihak yang dijelaskan dalam issue linkage yakni *linker* dan *linkee*. Pihak *linker* adalah pihak yang memberikan suatu penawaran sedangkan *linkee* adalah pihak yang menerima penawaran dari linker.

Kemudian, dalam hal ini Uni Eropa dapat diposisikan sebagai pihak *linker*. Uni Eropa dapat menjadi *linker* karena memiliki kekuatan yang lebih unggul dibandingkan pihak *linkee*. Meskipun dalam teori *issue linkage* tidak dijelaskan terkait indikator kekuatan, Uni Eropa merupakan sebuah entitas supranasional yang memiliki kekuatan dalam hal kelembagaan dan mekanisme aturan dengan tingkatan yang berada di tingkat regional maupun nasional. Menurut Peter L. Lindseth, organisasi supranasional seperti Uni Eropa memiliki wewenang dalam membuat peraturan (*rulemaking*), adjudikasi (*adjudication*), dan penegakan hukum (*enforcement power*) (Lindseth 2016, 152).

Selanjutnya, Republik Ceko diposisikan sebagai pihak *linkee* yang menerima penawaran dari Uni Eropa. Republik Ceko menjadi pihak *linkee* karena menjadi pihak yang menerima penawaran dalam proses berlangsungnya persetujuan kebijakan. Tawaran-tawaran yang diberikan oleh Uni Eropa adalah agar Republik Ceko menyetujui dan membantu Republik Ceko dalam mengimplementasikan kebijakan *European Green Deal* (EGD).

1.7 Argumen Sementara

Dengan menggunakan pendekatan *issue linkage*, dapat disimpulkan bahwa proses persetujuan yang berlangsung adalah dengan cara menghubungkan dua isu yang berbeda yaitu isu lingkungan dengan isu ekonomi yang mendorong Republik Ceko untuk turut serta dalam menyetujui kebijakan *European Green Deal* (EGD). Penelitian ini melihat bahwa, Republik Ceko dalam kaitannya dengan proses persetujuan EGD berperan sebagai *linkee* dan Uni Eropa sebagai *linker*. Uni Eropa memberikan penawaran yang mencakup pemberian pendanaan untuk investasi

berkelanjutan terutama pembangunan pada transisi energi, pengakuan terhadap energi nuklir sebagai energi bersih, dan fleksibilitas dalam pencapaian target EGD. Dukungan yang diberikan dengan harapan agar Republik Ceko dapat turut berpartisipasi dalam menyetujui kebijakan EGD sehingga dapat mencapai tujuan iklim tahun 2030 dan tujuan jangka panjang yaitu netralitas karbon tahun 2050.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam menemukan data-data penelitiannya menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian berbasis literatur yang menekankan kalimat menjadi sebuah argumen.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini memfokuskan pada analisis Republik Ceko terhadap kebijakan *European Green Deal* terlebih pada pembahasan transisi energi terbarukan dengan proses persetujuan yang dilakukan antara Republik Ceko dan Uni Eropa sehingga menghasilkan keuntungan bersama.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan data sekunder. Di mana, data yang dikumpulkan atau dilaporkan melalui artikel, jurnal, dan buku yang sesuai dengan penelitian yaitu terkait kebijakan *European Green Deal* antara Uni Eropa dengan Republik Ceko yang dapat membantu melengkapi penelitian ini. Selain itu, data yang diperoleh penulis juga berasal dari *website* resmi Komisi Eropa dan

publikasi di media massa, berita, dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian, penulis melakukan riset terlebih dahulu terhadap data-data yang telah didapatkan berasal dari sumber yang kredibel dan melakukan pendalaman materi dengan membaca isi dari data yang telah didapatkan. Tahap selanjutnya, melakukan pencatatan bagian penting yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian dan membagi ke dalam bagian-bagian yang telah ditentukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama, penelitian ini akan membahas dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab kedua, akan menjelaskan kebijakan *European Green Deal* (EGD) secara detail terlebih pada tujuan kebijakan tersebut serta bagaimana dan siapa saja Negara Anggota yang menolak kebijakan tersebut. Pada bab ketiga, akan menjelaskan secara detail dari *issue linkage* terlebih penjelasan terkait *linkee* dan *linker* oleh masing-masing pihak, pemberian penawaran kepada Republik Ceko, dan penjelasan aspek *win* dan *loss* oleh masing-masing pihak dalam penelitian ini. Pada bab terakhir atau keempat, akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi berisi evaluasi dari hasil penelitian yang telah dibuat.

BAB 2

KEBIJAKAN *EUROPEAN GREEN DEAL* 2019

2.1 *European Green Deal* (EGD)

Pada tahun 2019, Uni Eropa meluncurkan sebuah kebijakan *European Green Deal* (EGD) sebagai strategi pertumbuhan hijau di Uni Eropa kepada Negara Anggota. Kebijakan EGD berisi tentang inisiatif kebijakan untuk jalur transisi hijau dengan tujuan iklim 2030 dan tujuan jangka panjang mencapai netralitas iklim 2050. Kebijakan EGD dirancang oleh Uni Eropa sebagai bentuk komitmen dan kontribusi Uni Eropa terhadap Perjanjian Paris yang telah diratifikasi bersama dengan Negara Anggota untuk menetapkan tujuan dalam menjaga pemanasan global dibandingkan dengan tingkat pra industri di tahun 2015. Selain itu, dalam kebijakan EGD menggarisbawahi keperluannya di semua sektor untuk berkontribusi langsung dalam memerangi perubahan iklim. Kebijakan ini menekankan pada semua sektor Uni Eropa meliputi energi, industri, transportasi, pertanian, keuangan berkelanjutan memiliki dukungan dalam kebijakan EGD. Adanya kebijakan EGD sesuai dengan Undang-Undang dalam Uni Eropa menerapkannya di semua Negara Anggota Uni Eropa (*European Council* 2019).

Pada Juni 2019, para pemimpin Uni Eropa menyerukan kebijakan strategis dalam membangun Uni Eropa yang netral karbon, hijau, adil, dan berwawasan sosial. Pemimpin Uni Eropa menyerukan bahwa pentingnya dalam memperkuat aksi iklim global untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi Uni Eropa untuk menjaga pemanasan global. Pada 12 Desember 2019, para pemimpin Uni Eropa membahas terkait perubahan iklim, anggaran jangka panjang Uni Eropa, dan isu-isu lainnya. Pada 13 Desember 2019, pembahasan berfokus pada

perekonomian Uni Eropa dan moneter serta brexit. Kemudian pada 19 Desember 2019, bersama dengan Badan Lingkungan Uni Eropa mengadakan agenda untuk bertukar pandangan mengenai kebijakan lingkungan dan iklim di Uni Eropa termasuk EGD (*European Council* 2019).

Pada tahun 2020, serangkaian diskusi dan pertemuan dilakukan untuk menetapkan tujuan dan pengimplementasiannya. Secara keseluruhan, di tahun 2020 membahas secara spesifik terkait poin-poin lingkungan yang akan diterapkan ke dalam EGD dan pertumbuhan ekonomi hijau. Bersama Komisi Eropa dan Menteri Lingkungan Uni Eropa membahas bahwa EGD dapat menjadi pertumbuhan hijau dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Penetapan target iklim 2030 dengan mencapai 55% dengan perbandingan di 1990 dan netralitas karbon 2050. Selain itu, bersama *Just Transition Fund* (JTF) akan memberikan bantuan pendanaan kepada Negara Anggota yang memiliki tantangan terhadap sosio-ekonomi akibat penerapan EGD (*European Council* 2019).

Pada tahun 2021, pembahasan yang dilakukan dengan berfokuskan pada komitmen Uni Eropa dalam perubahan iklim dengan EGD. Hal yang menjadi prioritas utama adalah aksi terhadap pengurangan *net-zero* emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 dengan pengurangan setidaknya sebesar 55% pada tahun 2030, dibandingkan dengan emisi pada tahun 1990. Dengan adanya target tersebut, di tahun 2021 juga menjadi penerapannya dalam mengesahkan *EU Climate Law*. Selain itu, pembahasan terkait *fit for 55* dengan aspek energi yang berfokuskan pada energi terbarukan dan efisiensi energi. (*European Council* 2019).

Pada tahun 2022 dan 2023, Uni Eropa mulai mengadopsi *fit for 55* kepada Negara Anggotanya untuk mengimplementasikan bersamaan dengan EGD.

Pembahasan yang dilakukan berfokuskan pada pengurangan emisi gas rumah kaca terlebih di sektor ekonomi dengan memastikan sektor yang terdampak dalam kebijakan EGD. Selain itu, pemberian dukungan terlebih pada sistem perdagangan emisi Uni Eropa, mekanisme penyesuaian batas karbon, dan pendanaan baru untuk iklim sosial. Dalam bagian *fit for 55* membahas terkait sektor transportasi untuk Negara Anggota mengadopsi efisiensi energi untuk berkontribusi dalam mencapai target (*European Council* 2019).

Pada tahun 2024, secara keseluruhan menjadi tahun di mana Uni Eropa menegaskan bahwa dalam kebijakan EGD tidak hanya berupa kerangka hukum akan tetapi untuk mencapai tujuan iklim dan ekonomi hijau. Kemudian, penerapannya dalam industri akan menyelaraskan dengan prinsip ekonomi sirkular. Di mana, setiap industri harus merancang dan memproduksi dengan produk yang mudah di daur ulang, serta menyediakan informasi lingkungan terkait siklus produk (*European Council* 2019).

Pada awalnya, kebijakan EGD akan direalisasikan sebagai strategi pertumbuhan domestik, kemudian EGD ditetapkan untuk mengambil peran penting dalam hal pembangunan dan kebijakan regional (Sandri et al. 2023, 12). Dalam kebijakan EGD memiliki 8 kunci utama meliputi: (1) Ambisi perubahan untuk 2030 dan 2050 yang berfokuskan pada pengurangan emisi karbon; (2) Energi bersih dan efisiensi transisi energi; (3) Strategi industri untuk ekonomi bersih dan sirkular; (4) Mobilitas cerdas dan berkelanjutan; (5) *Farm to fork strategy*; (6) Melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem; (7) Ambisi nol polusi untuk lingkungan bebas dari racun; dan (8) Mengutamakan keberlanjutan dalam semua

kebijakan Uni Eropa termasuk perdagangan dan kebijakan luar negeri (Almeida et al. 2023, 10).

Selanjutnya, salah satu tujuan dari kebijakan EGD adalah energi bersih dan efisiensi transisi energi. Di Uni Eropa, produksi dan penggunaan energi berkontribusi lebih dari 75% menghasilkan gas rumah kaca. Oleh karena itu, pengurangan sistem energi sangat penting untuk mencapai tujuan iklim 2030 dan jangka panjang dalam mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Ada 3 fokus utama dalam transisi energi yang akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas hidup warga meliputi: (1) Memastikan pasokan energi aman dan terjangkau; (2) Mengembangkan pasar energi yang terintegrasi penuh, saling berhubungan, dan digitalisasi; dan (3) Memprioritaskan efisiensi energi, peningkatan kinerja energi yang berdasarkan pada sumber terbarukan. Selanjutnya salah satu dari tujuan utama komisi adalah untuk membangun sistem energi yang saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung sumber energi terbarukan (EBT) (*European Commission* 2024).

2.2 Tujuan *European Green Deal* yang Ingin Dicapai

Dalam kebijakan *European Green Deal* (EGD), Uni Eropa memiliki visi dan misi dalam isu lingkungan yang menunjukkan bahwa Uni Eropa berkomitmen dalam memimpin aksi dan membentuk transisi hijau. Pada kebijakan EGD memiliki tujuan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca (GRK) yang memerlukan daya energi terbarukan dan efisiensi energi yang lebih besar. Selain itu, dalam penerapan kebijakan EGD dengan mengajak Negara-negara Anggota Uni Eropa untuk turut

berkomitmen dalam mengubah benua Uni Eropa menjadi benua pertama terhadap netralitas karbon pada tahun 2050 (*European Commission* 2021).

Dengan adanya keterlibatan Negara-negara Anggota seperti salah satunya adalah Republik Ceko akan mewujudkan berjalannya kebijakan EGD dan mencapai tujuan dari kebijakan EGD. Dengan demikian, pembuatan kebijakan EGD yang dirancang oleh Komisi Eropa sebagai badan eksekutif utama bersifat kebijakan hukum yang mengikat di Uni Eropa. Selain itu, kebijakan EGD telah disetujui oleh Negara Anggota dan Parlemen Eropa yang secara signifikan mengikat komitmen Negara-negara Anggota untuk mewujudkan tujuan akhir yaitu netralitas karbon 2050. Dengan penerapan target yang pasti akan memastikan Uni Eropa memiliki jalan dalam tujuan jangka panjang (*European Commission* 2024). Oleh karena itu, Republik Ceko yang merupakan salah satu Negara Anggota perlu untuk andil dalam berkomitmen pada kebijakan EGD dan mewujudkan Uni Eropa untuk menjadi benua pertama terhadap netralitas karbon pada tahun 2050.

2.2.1 Tujuan Ekonomi European Green Deal

Dalam mewujudkan kebijakan *European Green Deal* (EGD), Uni Eropa dalam kebijakan tersebut memiliki tujuan ekonomi untuk menjadi *global leadership* dalam investasi berkelanjutan dan transisi ekonomi hijau. Kemudian, jika tidak adanya langkah dalam mengatasi perubahan iklim akan mempengaruhi kerusakan global yang dapat mencapai hingga 12% dari GDP (*The Gross Domestic Product*). Oleh karena itu, dengan serangkaian kebijakan EGD memiliki tujuan yang berfokus pada sektor

ekonomi dengan tujuan yaitu ekonomi sirkular dan industri yang bersih (*European Council* 2019).

Pertama, ekonomi sirkular menjadi ekonomi dengan modul baru di mana semua produksi akan dilakukan dengan menggunakan kembali (*reused*), memperbaiki (*repaired*) dan mendaur ulang (*recycled*), mengurangi limbah (*reducing waste*) dan melestarikan sumber daya (*conserving resources*) (*European Council* 2019). Uni Eropa telah menetapkan kebijakan pada sirkularitas dan dukungan dari Negara Anggota yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya. Pada kebijakan EGD mendukung transisi pada ekonomi berkelanjutan yang mengurangi gas rumah kaca (GRK), efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta lapangan kerja dan inovasi teknologi dan industri bersih (De Pascale et al. 2023).

Kedua, mendorong industri Uni Eropa menjadi industri yang lebih bersih, berkelanjutan, hemat energi, dan dapat berkembang baik dalam pasar lokal hingga pasar global (*European Council* 2019). Pada tujuan industri bersih menjadi rencana bisnis Uni Eropa untuk mendukung daya saing dan ketahanan industri yang ada di Uni Eropa. Selain itu, tujuan tersebut untuk memberikan sebuah kepastian pada investor dan perusahaan bahwa Uni Eropa berkomitmen pada ekonomi yang netral terhadap iklim pada tahun 2050 (*European Commission* 2025).

Dalam mewujudkan kebijakan EGD, Uni Eropa dan Komisi Eropa berkomitmen untuk memberikan investasi berkelanjutan kepada negara-negara Anggotanya sebesar minimal €1 triliun dalam dekade mendatang.

Negara-negara Uni Eropa harus mengalokasikan dana setidaknya sebesar 30% dana yang telah diterima dari *European Regional Development Fund* untuk kepentingan kebijakan tersebut. Selain itu, 37% dari *Cohesion Fund* akan didistribusikan untuk kepentingan dalam mencapai netralitas karbon 2050. Upaya ini akan memobilisasi investasi untuk mendukung wilayah-wilayah yang paling terdampak dari kebijakan EGD (*European Commission* 2020).

Oleh karena itu, dalam mencapai kebijakan EGD Uni Eropa memiliki aksi dalam mencapainya. Pertama, *NextGenerationEU* merupakan instrumen sementara yang dirancang untuk mendorong pemulihan di Uni Eropa akibat pandemi dengan bantuan senilai lebih dari €800 miliar. *NextGenerationEU* memiliki inti yaitu *Recovery and Resilience Facility* (RRF) yang memberikan hibah dan pinjaman untuk mendukung reformasi dan investasi Negara Anggota dengan nilai total €723,8 miliar. Penerimaan dana ini mewajibkan Negara Anggota untuk menguraikan bagaimana dana yang telah diterima di alokasikan dan diinvestasikan dengan target yang relevan. Dana tersebut akan disalurkan dengan beberapa program Uni Eropa seperti the *Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe* (REACT-EU), *Horizon Europe*, *InvestEU*, *European Agricultural Fund for Rural Development* atau *Just Transition Fund* (JTF) (*European Commission* 2020).

Tabel 1. Rincian *NextGenerationEU*

<i>Recovery and Resilience Facility</i> (RRF)	€723,8 miliar
Di antaranya, pinjaman	€385,8 miliar
Di antaranya, hibah	€338 miliar

Sumber: Komisi Eropa (2020)

Tabel 2. Rincian Program *NextGenerationEU*

Program	<i>Funding</i>
ReactEU	€50.6 miliar
<i>Horizon Europe</i>	€5.4 miliar
InvestEU	€6.1 miliar
<i>Rural Development</i>	€8.1 miliar
<i>Just Transition Fund</i> (JTF)	€10.9 miliar
RescEU	€2 miliar
Total	€806.9 miliar

Sumber: Komisi Eropa (2020)

Kedua, dari adanya *NextGenerationEU*, Komisi Eropa selanjutnya akan mendanai hingga 30% dengan menerbitkan *NextGenerationEU Green Bonds*. *NextGenerationEU Green Bonds* memiliki keuntungan bagi Uni Eropa khususnya di pasar modal dan pasar keuangan berkelanjutan. Dengan praktik pasar yang berlaku, kerangka tersebut disusun dengan berdasarkan 4 pilar utama yaitu (1) Penggunaan dana yang akan digunakan untuk 9 kategori termasuk efisiensi energi, energi bersih, dan adaptasi perubahan iklim; (2) Proses untuk evaluasi pengeluaran dan pemilihan investasi

berdasarkan 37% pengeluaran RRF yang didedikasikan untuk iklim dan menjadi inti *NextGenerationEU*; (3) Manajemen pengeluaran yang akan dipantau oleh Komisi Eropa; dan (4) Laporan dengan menggunakan 2 tipe yaitu untuk menunjukkan pengeluaran yang digunakan pada *green bonds* (*allocation report*) dan pencapaiannya (*impact report*) (*European Commission* 2020).

Gambar 1. *NextGenerationEU Green Bonds Framework*



Sumber: Komisi Eropa (2021)

Ketiga, *Sustainable finance* memiliki peran penting dalam menyalurkan investasi swasta ke dalam transisi menuju ekonomi yang netral terhadap iklim dan bertujuan membantu untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kebijakan EGD. *Sustainable finance* juga memiliki peran dalam mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mencakup transparansi. Investasi yang dilakukan berupa investasi dalam metode produksi hijau atau mengurangi jejak karbon. *Sustainable finance* sangat dibutuhkan dalam proses berlangsungnya kebijakan EGD untuk mengurangi gas emisi rumah kaca hingga 55% dan tujuan lingkungan pada 2030. Uni Eropa mendukung transisi tersebut untuk

berada di garis terdepan dalam upaya membangun perekonomian yang berkelanjutan (*European Commission* 2020).

Keempat, *Just Transition Mechanism* (JTM) memiliki tujuan dalam mencapai kebijakan EGD tanpa satu pun yang tertinggal. JTM menyediakan dana untuk membantu negara yang terdampak dari adanya kebijakan EGD sebesar €55 miliar selama periode 2021-2027 untuk meringankan dampak sosio-ekonomi.

“We must show solidarity with the most affected regions in Europe, such as coal mining regions and others, to make sure the Green Deal gets everyone’s full support and has a chance to become a reality.” Frans Timmermans, Eksekutif *Vice-President* Komisi Eropa.

JTM berfokus pada 3 pilar yaitu (1) *Just Transition Fund* (JTF) yang memberikan dana dengan total sebesar €27 miliar; (2) *InvestEU* “Just Transition” proyek yang menyediakan jaminan anggaran investasi pada sektor swasta sebesar €10-15 miliar; dan (3) *A new Public Loan Facility* yang akan menggabungkan dana hibah dari anggaran Uni Eropa dengan dana pinjaman dari Bank Investasi Uni Eropa sebesar €13.3-15.3 miliar investasi publik (*European Commission* 2020).

2.2.2 Tujuan Non-Ekonomi European Green Deal

Selain tujuan ekonomi, Uni Eropa dalam mencapai kebijakan *European Green Deal* (EGD) memiliki tujuan lain seperti pada sektor lingkungan. Langkah Uni Eropa dalam menciptakan kebijakan EGD menjadi aksi Uni Eropa terhadap komitmen untuk mengatasi permasalahan

lingkungan. Salah satu tujuan dari EGD adalah menciptakan Uni Eropa dengan adanya energi bersih dan efisiensi transisi energi dengan mencapai tujuan iklim pada tahun 2030 dan tujuan akhir jangka panjang dalam mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Kemudian, dengan kebijakan EGD berupaya untuk menjadikan Uni Eropa menjadi benua pertama terhadap netralitas karbon pada tahun 2050. Dengan serangkaian tujuan tersebut menjadi visi kebijakan EGD untuk mengurangi polusi dan memulihkan keseimbangan yang sehat untuk alam dan ekosistemnya.

“The transition to climate neutrality will bring significant opportunities, such as potential for economic growth, for new business models and markets, for new jobs and technological development.” Dewan Eropa, 12 Desember 2019.

Pertama, netralitas karbon di Uni Eropa dengan pengurangan secara drastis pada emisi gas rumah kaca yang akan menjadikan Uni Eropa sebagai kawasan netral iklim pertama di dunia dengan melakukan transisi energi terbarukan. Kedua, memastikan lingkungan yang lebih sehat untuk generasi yang mendatang dengan rencana dalam memulihkan alam dan upaya mencapai nol polusi. Ketiga, pertanian yang berkelanjutan atau *farm to fork strategy* dengan praktik pertanian yang ramah lingkungan dengan memadukan perlindungan sekaligus penyedia pasokan makanan yang lebih sehat dan terjangkau (*European Council* 2019).

2.3 Penolakan EGD oleh Negara Anggota

Pada 12 Desember 2019, para pemimpin Uni Eropa melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di Brussels untuk membahas rencana baru dengan menjadikan Uni Eropa netral karbon pada tahun 2050. Ursula von der Leyen sebagai Presiden Komisi Eropa menyatakan bahwa tantangan ini sebagai “man on the moon” bagi Uni Eropa (McEnchroe 2019). Dalam proses komitmen terhadap EGD, Negara-negara Anggota terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan, beberapa negara menyetujui dan beberapa negara tidak menyetujui. Beberapa negara yang menyetujui seperti Denmark, Swedia, dan Finlandia merupakan pelopor terhadap iklim yang mulai mengembangkan sumber EBT sebagai pembangkit listrik untuk mencapai tujuan netral karbon. Kemudian, Jerman sebagai negara pertama yang memulai untuk menghentikan penggunaan energi nuklir untuk mewujudkan EGD (Dennison, Loss, and Söderström 2021).

Selain itu, masih ada beberapa negara yang menolak adanya kebijakan tersebut dengan ambisi untuk mencapai tujuan iklim 2030 dan jangka panjang dalam mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Negara-negara yang menolak adanya kebijakan tersebut adalah Republik Ceko, Polandia, dan Hungaria. Hal ini karena dari 3 negara tersebut masih bergantung pada bahan bakar fosil batubara dan melihat bahwa dalam mengimplementasikannya akan membebani perekonomian negaranya (McEnchroe 2019).

Berdasarkan hal tersebut, muncul kekhawatiran oleh 3 Negara Anggota dalam mengimplementasikannya sehingga menolak adanya kebijakan EGD. Dengan menyesuaikan target EGD akan menimbulkan tantangan terlebih pada sosio-ekonomi seperti peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh penutupan

industri karbon terlebih industri batubara. Kemudian penurunan standar kehidupan terhadap pengurangan barang-barang atau penggunaan listrik sebagai kehidupan sehari-hari akan menjadi tantangan yang akan dihadapi. Hal tersebut merupakan akibat dari tujuan yang tidak realistis dan dampak dari pengurangan penggunaan bahan bakar batubara. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kesepakatan EGD diperlukannya alokasi dana yang besar untuk membantu menutupi kesenjangan kapasitas tersebut (Dennison, Loss, and Söderström 2021).

Pimpinan dari Uni Eropa berhasil meyakinkan kedua negara yaitu Republik Ceko dan Hungaria yang sebelumnya menentang kebijakan EGD. Republik Ceko dan Hungaria menginginkan adanya jaminan dalam bantuan dana oleh Uni Eropa untuk mengimplementasikan kebijakan EGD (Rankin 2019). Setelah 10 jam dilaksanakannya pembahasan mengenai EGD, tanpa menyebutkan Polandia, pernyataan tersebut menyatakan bahwa “salah satu negara anggota pada tahap ini tidak dapat berkomitmen untuk melaksanakan tujuan ini” (BBC 2019).

Sementara itu, setelah bernegosiasi pada pertemuan yang dilaksanakan di Brussels, para Pemimpin Uni Eropa kecuali Polandia telah menyetujui kebijakan EGD dengan capaian akhir jangka panjang netralitas karbon pada tahun 2050. Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babiš, berhasil memasukkan ketentuan yang memungkinkan beberapa negara untuk menambahkan energi nuklir ke dalam bauran energi dalam mengimplementasikan EGD (McEncroe 2019). Andrej Babiš menyatakan, “*Nuclear energy is clean energy, without any emissions. And I don’t know why a lot of countries have a problem with this.*” (Rankin 2019). Dengan demikian, pada pertemuan tersebut, Republik Ceko dan Hungaria menyetujui

kebijakan EGD setelah mendapatkan jaminan bahwa energi nuklir dapat menjadi bagian dari bauran energi (BBC 2019).

Sesuai dengan Pasal 50 *Treaty on European Union* (TEU), Negara Anggota yang menarik diri tidak diperbolehkan ikut serta dalam pembahasan Dewan Eropa atau mengambil keputusan dengan hal yang berkaitan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa dengan penolakan Polandia tidak akan menghentikan Komisi Eropa dalam menjalankan langkah-langkah untuk melanjutkan EGD (Rankin 2019).

BAB 3

PENETAPAN PIHAK *LINKER* DAN *LINKEE* DALAM EGD

Dalam menganalisis penelitian ini, terdapat dua aktor/pihak yang dijelaskan dalam *issue linkage* yakni *linker* dan *linkee*. Pihak *linker* adalah pihak yang memberikan suatu penawaran sedangkan *linkee* adalah pihak yang menerima penawaran dari *linker*. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *tactical linkage* yang menghubungkan dua isu berbeda dengan tujuan mencapai *quid pro quo*.

3.1 *Linker dan Linkee dalam Kebijakan EGD*

3.1.1 *Uni Eropa Sebagai Linker*

Dalam teori *issue linkage* untuk menentukan suatu pihak menjadi *linker* adalah dengan melihat pihak yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan pihak *linkee*. Dalam hal ini, dengan menggunakan salah satu metode yaitu *tactical linkage* yang menjelaskan bahwa kekuatan tergantung dari persepsi *linkee* terhadap kemampuan *linker* (Haas 1980, 372). Dengan penjelasan tersebut, Uni Eropa dapat diposisikan sebagai *linker* karena memiliki kekuatan dalam mengarahkan penawaran untuk persetujuan terhadap *European Green Deal* kepada Negara Anggota termasuk Republik Ceko. Uni Eropa telah memberikan penawaran kepada Republik Ceko berupa beberapa bantuan dalam proses berlangsungnya dan terealisasinya *European Green Deal*.

Berdasarkan hukum Uni Eropa, Uni Eropa merupakan organisasi regional yang bermula pada pembentukan *The European Coal and Steel Community* yang didirikan pada tahun 1952. Keduanya bersama dengan

European Economic Community dan *the European Atomic Energy Community* (Euratom) didirikan pada tahun 1958. Organisasi-organisasi tersebut berkembang melalui sejarah panjang dengan reformasi perjanjian yang bertahap sehingga menjadi Uni Eropa pada tahun 1992. Adanya Uni Eropa merupakan proyek politik maupun bentuk organisasi supranasional yang bersifat hukum.

Kemudian, Uni Eropa dapat diposisikan sebagai *linker* karena memiliki kekuatan yang lebih unggul dibandingkan dengan Republik Ceko. Hal ini dikarenakan Uni Eropa menjadi pasar tunggal yang membuat Uni Eropa dapat membiayai anggarannya sendiri dalam prioritas proyek-proyek yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar Negara Anggotanya. Uni Eropa sendiri berdiri sebagai pasar tunggal yang terdiri dari 27 negara termasuk Republik Ceko di dalamnya (*European Union* 2023).

Dalam proses berlangsungnya kebijakan EGD, Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang mendukung penuh kepada Negara Anggotanya dalam alokasi bantuan dana untuk merealisasikan kebijakan tersebut serta mengambil peran dalam kepemimpinan untuk transisi hijau. Uni Eropa sebagai pemimpin kebijakan transisi hijau dalam menetapkan standar peraturan internasional dan kerja sama yang telah dilakukan kepada Negara Anggotanya (*European Commission* 2021) menjadi alasan bahwa Uni Eropa memiliki kekuatan dibandingkan Republik Ceko sebagai negara anggota yang masih bergantung kepada Uni Eropa.

Di sisi lain, Uni Eropa ditemukan pada tahun 1951 setelah Perang Dunia Kedua oleh enam negara yaitu Belgium, Paris, Jerman, Italia,

Luksemburg, dan Belanda (*European Union* 2023). Kemudian, Republik Ceko sendiri menjadi bagian dari Negara Anggota Uni Eropa dan telah bergabung sejak tanggal 1 Mei 2004 yang dahulunya merupakan pecahan dari cecoslovakia pada tahun 1993. Di tanggal yang sama, telah bergabung 10 negara lainnya seperti Estonia, Siprus, Latvia, Lithuania, Hungaria, Malta, Polandia, Slovenia, dan Slovakia (*EU 10 Countries*). Bergabungnya negara anggota ke dalam bagian Uni Eropa memberikan keuntungan yang signifikan dan menumbuhkan perekonomian pada anggota baru (EU 10) dan Uni Eropa (*European Council* 2025). Pada akhirnya, dari enam negara di tahun 2004 tersebut kemudian berkembang hingga menjadi 27 Negara Anggota.

Bergabungnya Negara-negara Anggota menjadi bagian Uni Eropa, membuat negara tersebut seperti salah satunya Republik Ceko secara otomatis terikat dalam kebijakan maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Keterikatan Negara-negara Anggota tertera dalam Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Sesuai dengan Pasal 258, 259, dan 260 Ayat 1 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) tentang *the Court of Justice of the European Union* yang menetapkan langkah-langkah oleh Komisi Eropa jika Negara Anggota Uni Eropa tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan Pasal 258 TFEU yang telah ditetapkan menyatakan:

If the commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, it shall deliver a reasoned opinion on the matter after giving the State concerned the opportunity to submit its

observations. If the State concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the Commission, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.

Pada Pasal 259 TFEU menyatakan:

A Member State which considers that another Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties may bring the matter before the Court of Justice of the European Union. Before a Member State brings an action against another Member State for an alleged infringement of an obligation under the Treaties, it shall bring the matter before the Commission. The Commission shall deliver a reasoned opinion after each of the States concerned has been given the opportunity to submit its own case and its observations on the other party's case both orally and in writing. If the Commission has not delivered an opinion within three months of the date on which the matter was brought before it, the absence of such opinion shall not prevent the matter from being brought before the Court.

Pada Pasal 260 Ayat 1 menyatakan:

If the Court of Justice of the European Union finds that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, the State shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court.

Isi dari Pasal 258, 259, 260 Ayat 1 TFEU menjelaskan jika Negara Anggota tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diatur, maka Komisi Eropa akan memberikan kesempatan pada Negara Anggotanya untuk menyampaikan tanggapannya. Kemudian, jika dari Negara Anggota tidak

memenuhi kewajibannya maka dapat dibawa ke Mahkamah Hukum Uni Eropa.

Pada Pasal 288 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) tentang *the Legal Acts of the Union* menyatakan:

To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions. A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. A directive shall be binding, as to result to be achieved, upon each Member States to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. A decision shall be binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it is addressed shall be binding only on them. Recommendations and opinions shall have no binding force.

Isi dari Pasal 288 TFEU menjelaskan bahwa Negara-negara Anggota secara hukum akan terikat dalam menjalankan peraturan, arahan, dan pilihan yang bersifat mengikat dan berlaku pada seluruh Negara Anggota.

Sementara itu, Uni Eropa merupakan sebuah entitas supranasional yang memiliki kekuatan dalam hal kelembagaan dan mekanisme aturan dengan tingkatan yang berada di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, Uni Eropa memiliki hak dan wewenang dalam membuat peraturan dan menegakkan hukum yang dapat mengikat 27 negara anggota yang bergabung. Hal ini dibuktikan dengan pasal-pasal yang telah dijelaskan seperti; pada Pasal 258, 259, dan 260 Ayat 1 TFEU yang

menjelaskan bahwa Negara Anggota harus memenuhi kewajibannya dan jika tidak maka akan dibawa ke Mahkamah Hukum Uni Eropa, dan pada Pasal 288 TFEU yang menjelaskan bahwa secara hukum Negara Anggota terikat dalam menjalankan peraturan, arahan, dan pilihan yang akan mengikat 27 Negara Anggota termasuk Republik Ceko.

Berdasarkan hal tersebut, Uni Eropa sebagai entitas supranasional yang memiliki kekuatan pada regulasi yang luas dan dapat melakukan wewenang dalam membuat peraturan, adjudikasi, dan penegakan hukum dengan tingkatan yang relatif tinggi dari antarpemerintah atau nasional (Lindseth 2016, 152).

Pada struktur pembuat aturan, Uni Eropa memiliki peran dalam menyetujui dan merancang perundang-undangan di Uni Eropa, sedangkan Republik Ceko hanya memiliki kuasa dalam membuat hukum yang bersifat nasional dan menjaga kedaulatan nasional. Pada struktur adjudikasi, penerapan hukum Uni Eropa bersifat menyeluruh dan mengikat kepada seluruh Negara Anggota serta melibatkan institusi, perusahaan, hingga warga negara. Terakhir pada struktur penegakan hukum, Uni Eropa memiliki organisasi Mahkamah Hukum Uni Eropa yang berwenang dalam menegakkan aturan hukum Uni Eropa kepada Negara-negara Anggota.

Oleh karena itu, dari ketiga hal di atas, Uni Eropa memiliki kekuatan yang lebih unggul dibandingkan dengan Republik Ceko. Sesuai dengan teori *linkage* dalam menilai *linkee*, Uni Eropa memiliki kekuatan untuk menjadi pihak *linkee* yang dapat memberikan tawaran kepada pihak *linker*.

Dengan demikian, meskipun telah dilaksanakannya pertemuan terkait EGD, hal itu tetap menjadi tantangan yang berat bagi Republik Ceko. Karena Republik Ceko masih menggunakan bahan bakar batubara sebagai sumber utamanya. Sejak tahun 2019 dan 2021, ketika diselenggarakan kebijakan EGD dengan serangkaian proposal iklim yang diajukan untuk pengurangan emisi di Uni Eropa, bersama dengan anggota Parlemen Ceko menyetujui adanya kebijakan EGD (Gáfriková 2024).

Sesuai dengan penjelasan pada sub bab 1.6 dalam kerangka pemikiran, penelitian ini akan menggunakan *tactical linkage* dengan menggabungkan dua isu yang berbeda untuk mencapai tujuan dari kebijakan EGD. Dalam isu lingkungan adalah untuk mencapai tujuan iklim 2030 dan netralitas karbon 2050 dan pengakuan energi nuklir dalam energi bersih. Pada isu ekonomi sebagai penawaran berupa pemberian investasi dana kepada Republik Ceko untuk mengimplementasikan kebijakan EGD.

3.1.2 Republik Ceko Sebagai Linkee

Pada teori *issue linkage*, Republik Ceko memiliki peran sebagai *linkee* atau sebagai pihak yang menerima penawaran dari pihak *linker* (Uni Eropa). Pihak *linkee* memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya kerja sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Sesuai dengan penjelasan pada sub bab 3.1.1, Uni Eropa yang merupakan entitas supranasional memiliki hak dan wewenang dalam hal kelembagaan di tingkat regional maupun nasional sedangkan Republik Ceko merupakan negara anggota yang tergabung dengan Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, Republik Ceko

terikat dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, Republik Ceko dapat diposisikan sebagai *linkee* karena posisinya belum sebesar Uni Eropa.

Selain itu, dari hasil analisis pada sub bab 3.1.1 menunjukkan bahwa posisi Republik Ceko adalah sebagai *linkee* karena telah bergabung menjadi Negara Anggota secara hukum pada 1 Mei 2004. Sesuai dengan proses persetujuan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Republik Ceko adalah untuk menyetujui kebijakan EGD agar Republik Ceko dapat turut serta dalam mencapai target jangka panjang dengan netralitas karbon tahun 2050. Dengan keikutsertaan Negara-negara Anggota Uni Eropa termasuk Republik Ceko akan mempermudah terwujudnya kebijakan EGD tersebut dan mempermudah dalam mencapai targetnya serta mendukung Uni Eropa sebagai benua pertama yang netral iklim serta menjadikan Uni Eropa sebagai *global leadership* terhadap kebijakan iklim.

3.2 Tawaran yang Diberikan *Linker*

Pada teori *issue linkage* menjelaskan bahwa ada dua tujuan dalam taktik yang digunakan untuk mencapai. Pertama, untuk menciptakan manfaat bagi pihak yang sebelumnya menentang kebijakan. Kedua, mendorong negara-negara untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan *tactical linkage* yang menghubungkan dua isu yang berbeda serta pada penelitian ini akan mendekatkan pada isu lingkungan dan isu ekonomi.

Dalam hal isu lingkungan, sesuai dengan tujuan akhir netralitas karbon tahun 2050 menjadi tantangan tersendiri bagi Republik Ceko. Di mana, penggunaan

bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama di negaranya. Oleh karena itu, sesuai dengan analisis pada sub bab 2.3, Republik Ceko mengajukan kepada Komisi Eropa untuk memasukkan energi nuklir ke dalam kebijakan tersebut sebagai energi bersih. Selain itu, dengan adanya energi nuklir dalam kebijakan EGD akan mendorong bauran energi di Republik Ceko serta mendorong perekonomian Republik Ceko.

Dalam hal isu ekonomi, selaras dengan isu lingkungan yang ada, dengan adanya pengakuan energi nuklir sebagai energi bersih akan membantu dalam mendorong perekonomian di Republik Ceko. Selain itu, pada sub bab 2.3 juga menjelaskan bahwa Republik Ceko dalam mengimplementasikan kebijakan EGD menginginkan adanya bantuan dana untuk penerapan EGD terlebih untuk mendukung efisiensi energi menggunakan energi terbarukan.

Sesuai dengan hasil pembahasan EGD di Brussels pada 12 Desember, Andrej Babiš sebagai Perdana Menteri Republik Ceko menjelaskan bahwa tanpa adanya energi nuklir ke dalam kebijakan EGD, Republik Ceko tidak mampu untuk memenuhi dan mengimplementasikan ke dalam negaranya (McEnchroe 2019). Oleh karena itu, Uni Eropa memberikan pengakuan energi nuklir sebagai energi bersih dan dukungan atas pembangunan sekaligus pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 1.200 MW di Dukovany. Pembangunan tersebut akan beroperasi uji coba pada tahun 2036, beroperasi komersial pada tahun 2038, dan akan beroperasi selama 60 tahun dengan perkiraan penonaktifan pada tahun 2096. Kemudian, Komisi Eropa akan memastikan bahwa bantuan negara yang diberikan akan sesuai dengan tepat sasaran, proporsional, dan tidak mempengaruhi pasar energi Uni Eropa (*European Commission* 2024).

Dalam pertemuan yang telah diadakan pada 12 Desember 2019 Republik Ceko juga menginginkan adanya bantuan dana dalam mengimplementasikan kebijakan EGD. Selanjutnya, dalam membantu Republik Ceko, Uni Eropa memberikan penawaran yang mencakup, pertama melalui program *Just Transition Fund* (JTF) yang diadopsi oleh Komisi Eropa, Republik Ceko akan menerima sebesar €1.64 miliar untuk membantu menghapus tenaga listrik dari batubara di 2023 dan memastikan transisi yang adil menuju netralitas karbon. JTF membantu Republik Ceko khususnya di wilayah Karlovsky, Ustecky, Moravskoslezský di mana menjadi wilayah yang memiliki tingkat konsentrasi industri karbon yang tinggi terkait dengan industri batubara dan kimia. Sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh JTF yakni menerapkan kebijakan tanpa satu pun yang tertinggal (*European Commission 2022*).

Di Karlovsky, lebih dari 1.000 pekerjaan berhubungan dengan aktivitas pembangkit listrik yang menghasilkan polutan dan wilayah di Republik Ceko yang tidak berkembang tetapi memiliki potensi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Pada wilayah Karlovsky, JTF membantu masyarakatnya untuk membantu dan mengembangkan kreativitas pekerja (*European Commission 2022*).

Di Ustecky, 80% lignit atau batubara coklat Republik Ceko diekstraksi dan lebih dari 5.000 pekerjaan berhubungan dengan batubara, terdapat 4 pertambangan batubara, pembangkit listrik terbesar di Republik Ceko, dan industri kimia. Pada wilayah Ustecky, JTF memberikan dukungan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memulihkan ekonomi menjadi ekonomi sirkular dan berbasis sumber energi terbarukan (*European Commission 2022*).

Kemudian di Moravskoslezský, wilayah yang menjadi pertambangan batubara terbesar di Republik Ceko dengan 5.000 pekerjaan langsung di sektor tersebut yang menghadapi beberapa tantangan terkait lingkungan terutama polusi udara dan kontaminasi air tanah. Pada wilayah Moravskoslezský, JTF akan melakukan investasi dalam dekontaminasi dan mendukung penghapusan batubara di wilayah tersebut serta investasi yang direncanakan akan difokuskan pada bidang penyimpanan energi dan penelitian energi (*European Commission 2022*).

Kedua, Komisi Eropa atas nama Uni Eropa memberikan bantuan pendanaan sebesar €1.2 miliar untuk mempromosikan dekarbonisasi dan modernisasi *green district heating* yang hijau dan berbasis energi terbarukan. Bantuan ini akan mendukung pemasangan unit dalam pembangkit listrik dengan energi terbarukan dan modernisasi unit pemanasan yang sudah ada untuk beroperasi dengan menggunakan energi biomassa dan tidak lagi menggunakan energi batubara. Proyek-proyek tersebut mengharuskan dalam pengurangan minimum 15% dari emisi CO₂ dan 10% dalam konsumsi energi tak terbarukan primer. Kemudian, peralihan bahan bakar ke gas terbarukan dan rendah karbon atau menerapkan teknologi penyimpanan penangkapan karbon atau pemanfaatan karbon. Dari proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi CO₂ sekitar 889.550 ton per tahun (*European Commission 2022*).

Ketiga, bantuan juga diberikan sebesar €401 juta untuk mempromosikan *green district heating* yang berbasis energi terbarukan dan *waste heat*. Langkah ini akan berkontribusi dalam implementasi *Czechia's National Energy and Climate Plan* dan tujuan Uni Eropa yang berkaitan dengan kebijakan EGD. Bantuan ini akan mendukung dalam instalasi pembangkit listrik energi terbarukan yang berbasis

biomassa dengan kapasitas di atas 500 kW (kilowatt). Proyek-proyek tersebut akan terbuka untuk pemilik instalasi yang memegang lisensi energi panas dan memproduksi panas dari biomassa atau limbah yang dianggap sebagai energi terbarukan. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pemasangan dalam kapasitas pembangkit terbarukan sebesar 345 MWt (*Megawatts thermal*) (*European Commission* 2023).

Keempat, Komisi Eropa telah menyetujui skema senilai €2.5 miliar untuk membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi energi yang mendorong ke ekonomi hijau dan mempercepat transisi hijau Republik Ceko. Bantuan tersebut diberikan oleh *EU Modernisation* sebagai dana hibah langsung. Pendanaan tersebut akan digunakan kepada perusahaan industri energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari produksi perusahaan setidaknya 40% dan 20% dari konsumsi energi. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepada Republik Ceko untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan potensi distorsi persaingan dapat ditekan seminimal mungkin (*European Commission* 2023).

Kelima, dalam membantu Republik Ceko dalam produksi biometana² yang berkelanjutan, Komisi Eropa di bawah aturan Uni Eropa memberikan senilai €2.4 miliar. Dalam proses produksi biometana, produksi tersebut harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh *EU Renewable Energy Directive*. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komunitas energi terbarukan dengan proyek berkapasitas 6 MW (*Megawatt*). Kemudian, luaran capaian yang akan dihasilkan dengan harapan sekitar 337 juta meter kubik biometana berkelanjutan (*European Commission* 2023).

² Biogas untuk menghilangkan kotoran seperti karbon dioksida

Keenam, dengan perkiraan bantuan senilai €3.2 miliar untuk mendukung produksi listrik dari pembangkit listrik yang efisiensi tinggi terbarukan dan modern. Proyek-proyek yang beroperasi dengan menggunakan dan melibatkan gas alam akan diminta untuk peralihan dengan menggunakan ke gas terbarukan dan rendah karbon. Dalam hal ini, bantuan diberikan dalam bentuk bonus per MWh (*Megawatt hour*) listrik yang dihasilkan selama 15 tahun dan dari skema bantuan ini dapat menghasilkan penghematan sekitar 9.3 juta ton CO₂ per tahun (*European Commission* 2024).

Kemudian, meskipun target pada kebijakan EGD telah ditetapkan, Uni Eropa memberikan target yang fleksibel kepada negara yang membutuhkan bantuan dengan mempertimbangkan keadaan negara awal dengan target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Komisi Eropa memperkirakan kemampuan Republik Ceko dalam memenuhi target iklim pada tahun 2030 setidaknya mencapai target sebesar 25% yang berasal dari sumber energi terbarukan (*Publications Office of the European Union* 2023, 1).

Dengan menggunakan pendekatan *tactical linkage* dari tawaran-tawaran yang telah diberikan yang menggabungkan dua isu berbeda yaitu isu lingkungan dan isu ekonomi akan menghasilkan *quid pro quo*. Hasil yang dicapai adalah dengan persetujuan Republik Ceko dalam mengimplementasikan kebijakan EGD dan mendukung Uni Eropa mencapai target EGD serta menjadikan Uni Eropa sebagai *global leadership* dan juga menjadikan Uni Eropa sebagai benua pertama dalam netralitas karbon di tahun 2050. Selain itu, Republik Ceko mendapatkan hal yang diinginkan yaitu memasukkan energi nuklir ke dalam kebijakan EGD dan bantuan dana dalam mengimplementasikan EGD.

3.4 Aspek *Win* dan *Loss* Tiap Pihak

3.4.1 Aspek *Win* dan *Loss* Uni Eropa

Tujuan *European Green Deal* (EGD) adalah memberikan instruksi untuk legislasi Uni Eropa dan strategi pembangunan regional di mana kebijakan iklim dan pengurangan emisi karbon menjadi prioritas utama. Selain itu, pembuatan kebijakan EGD menjadi fokus Uni Eropa terhadap lingkungan dan menjadikan Uni Eropa sebagai benua netral iklim pertama di dunia dengan merencanakan tujuan jangka panjang netralitas karbon pada tahun 2050. Dengan adanya kebijakan EGD, menjadikan kebijakan tersebut sebagai prioritas utama dalam mengedepankan isu lingkungan di Uni Eropa. Kemudian, kebijakan EGD menjadi cara bagi Uni Eropa untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada masyarakat Uni Eropa dan dunia dalam perlindungan lingkungan hidup yang menjadi isu utama di dunia ini beberapa tahun terakhir (Eckert *and* Kovalevska 2021, 4).

Seperti yang disampaikan oleh Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa:

“We have a once in a generation opportunity to show the way with speed, ambition and a sense of purpose to secure the EU’s industrial lead in the fast-growing net-zero technology sector. Europe is determined to lead the clean tech revolution. For our companies and people, it means turning skills into quality jobs and innovation into mass production, thanks to a simpler and faster framework. Better access to finance will allow our key cleantech industries to scale up quickly.”

Dengan bergabungnya Negara-negara Anggota termasuk Republik Ceko yang pada awalnya menolak kebijakan dan kemudian bergabung, menjadikan hal tersebut menjadi aspek *win* bagi Uni Eropa. Hal ini karena, Uni Eropa dapat mencapai targetnya dalam mencapai tujuan iklim pada 2030 dan tujuan jangka panjang dalam mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Selain itu, menjadikan Uni Eropa sebagai benua pertama terhadap netralitas karbon tahun 2050 dan memimpin secara global dalam kebijakan iklim.

Sesuai dengan tujuan Uni Eropa dalam mengimplementasikan kebijakan EGD untuk capaian jangka panjang netralitas karbon 2050 dan menjadikan Uni Eropa sebagai *global leadership* dalam kebijakan iklim. Dengan adanya penolakan terhadap kebijakan tersebut dapat menghambat dari tujuan ataupun target tersebut. Oleh karena itu, ketika kebijakan tersebut diterapkan dan adanya penolakan dari beberapa negara seperti Republik Ceko akan menghambat tujuan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Uni Eropa memberikan beberapa penawaran seperti bantuan pendanaan investasi, pengakuan energi nuklir sebagai energi bersih, dan fleksibilitas target kepada Republik Ceko.

Akan tetapi, tawaran yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Republik Ceko terkait pengakuan energi nuklir memberikan kecaman dari beberapa Negara Anggota anti nuklir seperti Jerman. Hal ini karena energi nuklir menghasilkan limbah yang berbahaya dan akan memperburuk keanekaragaman hayati dan alam. Transisi energi terbarukan dapat berlangsung dengan adanya penghematan energi untuk menyelesaikan

krisis iklim. Dengan adanya pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) akan menghasilkan pembiayaan yang cukup besar dan energi nuklir bukan sebagai solusi untuk krisis iklim (*Greenpeace European Unit* 2022).

Adanya pengakuan nuklir tersebut dapat menimbulkan stigma negatif kepada Uni Eropa seperti munculnya *greenwashing*³ atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan EGD. Dengan adanya potensi tersebut dapat merusak kredibilitas Uni Eropa dalam mencapai *global leadership* terutama dalam netralitas karbon. Kemudian, pengakuan tersebut dapat memunculkan perdebatan dengan Negara-negara Anggota yang anti nuklir seperti Jerman yang merupakan negara pertama dalam menghentikan penggunaan energi nuklir untuk mewujudkan EGD.

3.4.2 Aspek Win dan Loss Republik Ceko

Bergabungnya Republik Ceko dengan menyetujui keikutsertaannya dalam kebijakan *European Green Deal* (EGD) memberikan aspek *win* yang akan diperoleh oleh Republik Ceko. Tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh Uni Eropa sebagai kunci dalam persetujuan Republik Ceko dalam kebijakan EGD. Penawaran yang diberikan oleh pihak *linker* (Uni Eropa) yaitu tawaran pertama adalah pengakuan atas energi nuklir yang merupakan sumber energi utama Republik Ceko sehingga adanya pengakuan ini dapat mempermudah bauran energi. Tawaran kedua adalah dengan pemberian investasi dana yang dapat dilakukan untuk membantu Republik Ceko dalam

³ Klaim ramah lingkungan akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya

tantangan yang dihadapinya. Penawaran terakhir atau ketiga adalah dengan memberikan fleksibilitas target kepada Republik Ceko yang merupakan Negara Anggota paling terdampak dengan adanya kebijakan EGD, sehingga memberikan target yang sesuai dengan keadaan di Republik Ceko setidaknya sebesar 25% yang bersumber dari energi terbarukan untuk tujuan iklim 2030.

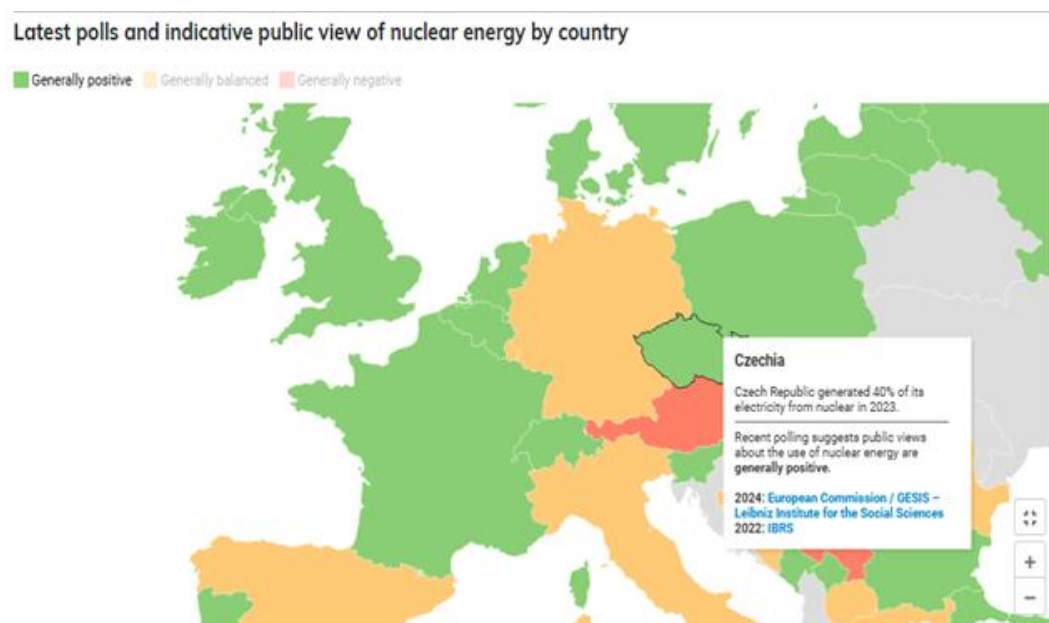
Pada penawaran pertama, Komisi Eropa atas nama Uni Eropa telah memberikan pengakuan dan menyetujui energi nuklir sebagai salah satu dari energi terbarukan. Pengakuan tersebut sesuai dengan peraturan *EU State aid* dan sesuai dengan Pasal 194 (2) *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa tidak akan mempengaruhi hak Negara Anggota dalam menentukan kondisi untuk mengeksploitasi sumber daya energinya, pilihannya di antara sumber-sumber energi yang berbeda, dan struktur umum pasokan energinya (*European Commission 2024*).

Oleh karena itu, dukungan dalam pengakuan energi nuklir dan penggunaan energi nuklir di Republik Ceko harus dilakukan untuk mengembangkan ekonomi Republik Ceko dan penyesuaian dalam kebijakan EGD. Adanya pengakuan terhadap energi nuklir akan mempermudah dalam mengimplementasikan kebijakan EGD yang sesuai targetnya di negaranya Republik Ceko. Terlebih, pembangunan reaktor nuklir akan membantu dalam mendorong perekonomian Republik Ceko. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kontrak dalam mendirikan proyek di Dukovany bersama dengan *Korea Hydro and Nuclear Power*

(*World Nuclear News* 2025). Adanya perjanjian kontrak tersebut akan membantu dalam mendorong perekonomian dan membantu Republik Ceko dalam mencapai target dari kebijakan EGD yaitu tujuan iklim tahun 2030 dan netralitas karbon 2050.

Selain itu, adanya dukungan terhadap pengakuan energi nuklir yang berdasarkan survei Eurobarometer, warga Republik Ceko percaya bahwa energi nuklir sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi dan energi di negara Republik Ceko itu sendiri. Energi nuklir akan menjadi penopang utama bauran energi bersama dengan energi terbarukan untuk Republik Ceko (Zachová 2025).

Gambar 2. Survei Dukungan Warga Republik Ceko Terhadap Energi Nuklir



Sumber: *World Nuclear Association* (2025)

Pada penawaran pertama, Uni Eropa sebagai pihak yang memiliki kekuatan dan sebagai pihak *linkee* memberikan bantuan berupa investasi

dana. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membantu seperti pembangunan berkelanjutan, mendukung dalam dekarbonisasi yang mencakup tujuan ekonomi Republik Ceko seperti mendukung peralihan energi batubara dan produksi di Republik Ceko, peningkatan efisiensi energi, serta peningkatan dalam menciptakan lapangan kerja di Republik Ceko.

Tawaran pertama dalam pemberian dana yaitu dengan memberikan melalui program *Just Transition Fund* (JTF). Program tersebut merupakan program Komisi Eropa dengan memberikan dana sebesar €1.64 miliar untuk membantu menghapus tenaga listrik dari batubara dan memastikan transisi yang adil menuju netralitas karbon (*European Commission* 2022).

Tawaran kedua dalam pemberian bantuan dana sebesar €1.2 miliar. Bantuan ini sebagai pendukung Komisi Eropa atas nama Uni Eropa untuk mendukung dekarbonisasi Republik Ceko yang mendukung peralihan bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang rendah karbon (*European Commission* 2022).

Tawaran ketiga dalam pemberian bantuan dana sebesar €401 juta. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pemasangan dalam kapasitas pembangkit terbarukan sebesar 345 MWt (*Megawatts thermal*). Selain itu, bantuan tersebut akan membantu pembangunan listrik energi terbarukan berbasis biomassa dengan kapasitas di atas 500 kW (kilowatt) (*European Commission* 2023).

Tawaran keempat dalam pemberian bantuan dana sebesar €2.5 miliar. Bantuan dana tersebut akan digunakan untuk membantu perusahaan

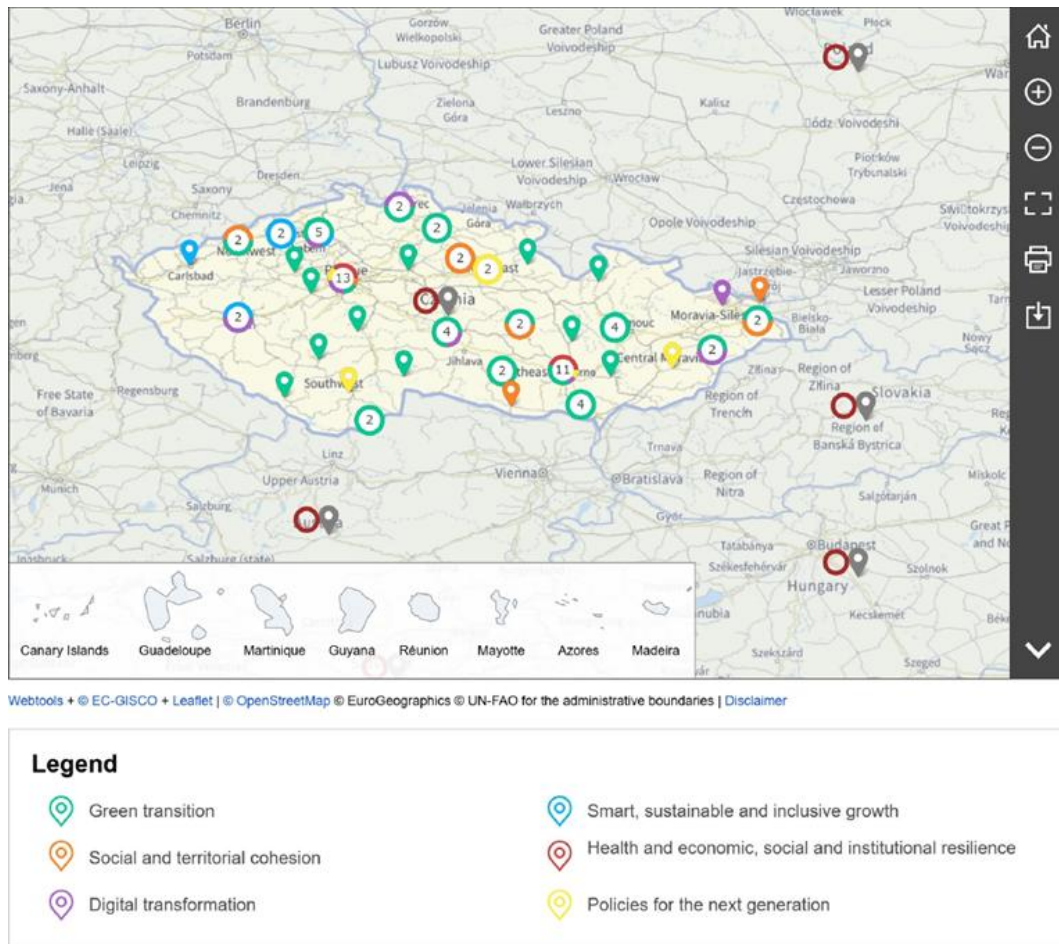
atau industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 40% dan 20% dari penggunaan energi dan membantu dalam mempercepat ekonomi hijau di Republik Ceko (*European Commission 2023*).

Tawaran kelima dalam pemberian bantuan dana sebesar €2.4 miliar. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komunitas energi terbarukan dalam produksi biometana yang berkelanjutan dan proyek berkapasitas 6 MW (Megawatt) (*European Commission 2023*).

Tawaran keenam dalam pemberian bantuan dana sebesar €3.2 miliar. Bantuan ini akan digunakan dalam mendukung produksi listrik dan pembangkit listrik dengan efisiensi energi terbarukan dan rendah karbon (*European Commission 2024*).

Investasi maupun pemberian dana yang telah diberikan kepada Republik Ceko dan total pendanaan akan dialokasikan sesuai dengan tujuan dana tersebut. Fokus utama dalam rencana tersebut akan mendukung investasi dalam transisi hijau, transisi digital, dan ketahanan sosio ekonomi. Selain itu, pemberian bantuan investasi akan membantu negara Republik Ceko untuk menjadi negara yang lebih berkelanjutan dan siap menghadapi peluang transisi hijau dan transisi digital. Dampak yang akan diberikan menghasilkan kombinasi yang kuat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Republik Ceko. Secara keseluruhan, investasi ini diharapkan dapat meningkatkan energi terbarukan dan mempercepat dekarbonisasi di berbagai sektor yang ada seperti pembangkitan energi terbarukan, pembangunan bangunan, dan peningkatan transportasi di Republik Ceko (*European Commission 2023*).

Gambar 3. Peta Proyek Dalam Rencana Pemulihan dan Ketahanan di Republik Ceko



Sumber: Komisi Eropa (2023).

Sesuai dengan **gambar 3**, peta tersebut bertujuan untuk memberikan informasi proyek-proyek yang telah didanai oleh Uni Eropa dalam pembangunan yang dilakukan di Republik Ceko.

Penawaran yang terakhir atau ketiga adalah pemberian fleksibilitas target kepada Republik Ceko. Pemberian tawaran ini diberikan karena melihat keadaan Republik Ceko yang masih menggunakan batubara sebagai energi utamanya. Dengan adanya peralihan secara drastis di Republik Ceko akan memberikan dampak yang signifikan terlebih pada masyarakatnya.

Peralihan secara langsung yang sesuai dengan target EGD akan memberikan dampak pada pertahanan stabilitas ekonomi, stabilitas infrastruktur, dan dampak pada persaingan global.

Oleh karena itu, Uni Eropa memberikan target yang fleksibel kepada Republik Ceko sebagai negara yang terdampak dengan mempertimbangkan keadaan negara awal dengan target yang telah ditentukan pada kebijakan EGD. Setelah pertimbangan yang ada, Uni Eropa memberikan target setidaknya dapat memenuhi target iklim tahun 2030 dapat mencapai sebesar 25% yang berasal dari sumber energi terbarukan. Adanya penyesuaian target tersebut dapat memudahkan Republik Ceko dalam berpartisipasi dalam mencapai tujuan kebijakan EGD dan mendukung Uni Eropa dalam mencapai *global leadership* terhadap kebijakan iklim dan benua pertama yang netral iklim.

Akan tetapi, dalam proses persetujuan kebijakan EGD pada awalnya Republik Ceko menolak untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di negaranya. Banyak tantangan yang akan dihadapi Republik Ceko ketika menyetujui kebijakan EGD dengan target yang telah ditetapkan. Tantangan tersebut adalah hal yang membuat Republik Ceko khawatir terhadap negara untuk penerapan kedepannya. Tantangan yang dihadapi akan memberikan dampak ke berbagai sektor yang ada di Republik Ceko mulai dari ekonomi, sosio-ekonomi, hingga pertanian. Oleh karena itu, Republik Ceko pada awalnya menolak untuk bergabung dalam kebijakan EGD.

Republik Ceko merupakan republik parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang menjadi kepala pemerintahan dan seorang

presiden yang menjadi kepala negara (*European Union* 2020). Pada tahun 2019, saat itu Perdana Menteri Republik Ceko dipimpin oleh Andrej Babiš. Andrej Babiš merupakan seorang pragmatis (*The Economist* 2025) di mana seorang pragmatis akan memikirkan suatu hal yang efektif untuk diterapkan. Andrej Babiš menyetujui adanya tujuan lingkungan dengan tujuan akhir netralitas karbon 2050. Akan tetapi, penerapan EGD akan menjadi tantangan bagi Republik Ceko dan menilai bahwa EGD terlalu ambisius dalam penetapan target kepada negara-negara anggotanya (*Komunikace* 2020). Penerapan target yang tidak sesuai dengan negara masing-masing akan menjadi tantangan tersendiri terlebih pada sosio-ekonomi Republik Ceko.

Dengan demikian, penerapan kebijakan EGD menjadi tantangan yang besar untuk mengimplementasikannya karena kebijakan EGD dinilai sebagai kebijakan yang memiliki level risiko yang cukup tinggi. Hal tersebut karena, jika penerapan kebijakan EGD gagal, maka akan memberikan dampak pada ekonomi dan respon kepada masyarakat atas ambisi dalam aksi iklim secara global. Kemudian, jika penerapan EGD berhasil dalam mencapai targetnya, akan menjadikan Uni Eropa sebagai pemimpin global pada kebijakan iklim dan teknologi hijau (*Dennison, Loss, and Söderström* 2021).

Selanjutnya, tantangan pada sosio-ekonomi yang akan dihadapi Republik Ceko akan mempengaruhi penurunan jumlah pekerja yang mengakibatkan peningkatan pada kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh penutupan industri bahan bakar fosil seperti industri batubara. Dalam

4 tahun sejak tahun 2019 hingga 2023, Uni Eropa sendiri mengalami penurunan pada lapangan pekerjaan dengan jumlah sebesar 853.000 ribu pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Banyak dari Negara-negara Anggota yang mengalami kehilangan pekerjaannya seperti salah satunya Republik Ceko yang mengalami penurunan sebesar 11% dalam hitungan persentase (*European Trade Union Confederation* 2024).

Tabel 3. 10 Negara yang Kehilangan Jumlah Pekerjaan Terbanyak

Negara	% (Persentase) Perubahan 2019 ke 2030	Perubahan Aktual 2019 ke 2023
Polandia	8.4%	-278.200
Republik Ceko	11.3%	-161.400
Romania	8.8%	-144.000
Jerman	1.6%	-129.300
Bulgaria	13.1%	-79.100
Slovakia	9.4%	-59.600
Paris	1.7%	-53.600
Kroasia	14.2%	-42.800
Slovenia	14.2%	-37.200
Portugal	2.3%	-18.800

Sumber: *European Trade Union Confederation* (2024)

Hal tersebut karena, batubara masih menjadi bahan bakar utama yang digunakan sebagai sumber energi oleh Republik Ceko. Kemudian, adanya penurunan standar kehidupan Republik Ceko dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan listrik jika mulai mengimplementasikan kebijakan EGD yang sesuai dengan tujuannya. Penerapan yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan EGD dianggap tidak realistis oleh Republik

Ceko, terlebih jika harus menerapkan sesuai dengan tujuan kebijakan EGD yaitu untuk mengurangi gas emisi rumah kaca hingga 55% pada tahun 2050 dan tujuan lingkungan pada tahun 2030 (Dennison, Loss, and Söderström 2021).

Di sisi lain, transisi energi dari bahan bakar batubara menuju energi terbarukan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan kebijakan EGD. Akan tetapi, untuk melaksanakan transisi tersebut memerlukan biaya yang sangat besar. Penggunaan biaya akan mencakup pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan teknologi hijau yang ramah lingkungan. Selain itu, diperlukannya investasi dalam penyediaan pelatihan untuk sumber daya manusia dan penguatan sistem energi terbarukan. Oleh karena itu, untuk menyetujui kebijakan EGD membuat Republik Ceko khawatir jika mengimplementasikan dan menyesuaikan dengan target yang telah ditentukan akan mempengaruhi ekonomi Republik Ceko.

Meskipun demikian, pada akhirnya Republik Ceko mulai menyetujui kebijakan EGD dengan adanya penawaran yang telah diberikan oleh Uni Eropa sejak tahun 2019 bersama dengan Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babiš menyetujui adanya kebijakan EGD. Akan tetapi, setelah disetujuinya kebijakan EGD, beberapa dari masyarakat Republik Ceko menolak persetujuan kebijakan EGD seperti para petani. Petani-petani di Republik Ceko melakukan protes dengan memblokir satu jalur utama di Kementerian Pertanian dengan menggunakan traktor sehingga memperlambat lalu lintas, akan tetapi tidak sampai membuat kemacetan di

jalan raya. Hal ini karena banyaknya para petani yang mengeluh tentang kebijakan EGD yang menyangkut protes terhadap biaya energi yang tinggi. Banyak dari petani mengeluhkan terkait harga pembelian dan biaya yang rendah akibat adanya penetapan peraturan pertanian yang tertuang dalam kebijakan EGD (Korinkova 2024).

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2019, Uni Eropa merancang dan meluncurkan sebuah kebijakan tentang lingkungan yaitu *European Green Deal* (EGD) yang berisi tentang inisiatif dalam transisi hijau dengan mencapai tujuan iklim di tahun 2030 dan tujuan akhir netralitas karbon di tahun 2050. Dalam kebijakan EGD memiliki fokus yang meliputi: ambisi perubahan tahun 2030 dan 2050 yang berfokus pada pengurangan emisi karbon; energi bersih dan efisiensi transisi energi; strategi industri untuk ekonomi bersih dan sirkular; mobilitas cerdas dan berkelanjutan; *farm to fork strategy*; melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem; ambisi nol polusi untuk lingkungan bebas dari racun; dan mengutamakan keberlanjutan di semua kebijakan.. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari kebijakan EGD, diperlukannya dukungan dari Negara-negara Anggota untuk turut serta mengimplementasikan kebijakan EGD.

Akan tetapi, dalam proses komitmen terhadap kebijakan EGD terbagi menjadi dua kubu yang saling berlawanan. Beberapa Negara Anggota menyetujui kebijakan EGD dan beberapa tidak menyetujui karena memperkirakan tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan di negaranya. Salah satu negara yang menolak adanya kebijakan EGD adalah Republik Ceko. Republik Ceko memiliki kekhawatiran dalam mengimplementasikan kebijakan EGD, terlebih sumber energi utama di Republik Ceko adalah batubara. Selain itu, Republik Ceko menilai bahwa target dari tujuan kebijakan EGD dinilai tidak realistis jika

diterapkan. Oleh karena itu, dalam proses persetujuannya, Uni Eropa memberikan tawaran-tawaran kepada Republik Ceko.

Pada proses yang terjadi antara Uni Eropa dan Republik Ceko dapat dilihat dengan menggunakan teori *linkage*. Teori *linkage* membagi dua peran yaitu *linker* atau pihak yang memberikan penawaran yakni Uni Eropa dan *linkee* atau pihak yang menerima penawaran yakni Republik Ceko. Pada teori ini, dapat dilihat juga dari aspek *win* dan *loss* oleh masing-masing pihak.

Tabel 4. Aspek *Win* dan *Loss* Uni Eropa dengan Republik Ceko

Aspek	Uni Eropa (<i>Linker</i>)	Republik Ceko (<i>Linkee</i>)
<i>Win</i>	1. Tercapainya tujuan dari EGD akan menjadikan Uni Eropa sebagai <i>global leadership</i> terlebih pada kebijakan iklim. 2. Selain itu, Uni Eropa akan menjadi benua pertama yang netral iklim.	1. Adanya pengakuan energi nuklir akan mempermudah bauran energi dan mendorong perekonomian di Republik Ceko. 2. Pendanaan yang diberikan kepada Republik Ceko akan memudahkannya dalam mengimplementasikan EGD yang akan digunakan pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan dekarbonisasi. 3. Penetapan fleksibilitas kepada Republik Ceko tidak akan memberatkannya dalam mengimplementa

		sikan kebijakan EGD.
Loss	1. Adanya penolakan dari Negara-negara Anggota dalam mengimplementasikan kebijakan EGD akan menghambat tujuan dari EGD dan Uni Eropa itu sendiri. 2. Uni Eropa mendapatkan kecaman dari beberapa negara anti-nuklir seperti Jerman setelah mengumumkan pengakuan energi nuklir menjadi energi bersih. 3. Dari adanya kecaman tersebut akan menimbulkan <i>greenwashing</i> yang dapat merusak kredibilitas Uni Eropa sebagai <i>global leadership</i>.	1. Dalam mengimplementasikan kebijakan EGD menjadi tantangan untuk Republik Ceko karena memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika penerapannya gagal diimplementasikan, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tiap sektornya di Republik Ceko. 2. Dalam mengimplementasikan kebijakan EGD diperlukannya investasi yang cukup tinggi agar tercapainya target yang telah ditentukan. 3. Adanya tantangan dari sosio-ekonomi, di mana bahan bakar batubara masih menjadi sumber utama yang akan berdampak seperti salah satunya pada peningkatan pengangguran di Republik Ceko. 4. Selain itu, penerapan kebijakan EGD

		mendapatkan aksi protes seperti dari petani yang menyuarakan aksinya terhadap biaya energi yang tinggi yang akan berdampak pada harga jual dan beli produk.
--	--	---

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Sesuai dengan penjelasan di atas, penelitian ini dengan menggunakan *tactical linkage* yang menggabungkan dua isu yang berbeda untuk mencapai tujuan dari kebijakan EGD. Dalam isu lingkungan adalah untuk mencapai tujuan iklim 2030 dan netralitas karbon 2050 dan pengakuan energi nuklir dalam energi bersih sesuai dengan pengajuan Republik Ceko. Pada isu ekonomi sebagai penawaran berupa pemberian investasi dana kepada Republik Ceko untuk mengimplementasikan kebijakan EGD.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dari isi dan hasil penelitian. Pada penelitian ini, sumber yang didapatkan masih terbatas karena kurangnya penelitian yang membahas secara spesifik terhadap persetujuan beberapa Negara Anggota seperti Republik Ceko yang pada awalnya menolak kebijakan *European Green Deal* kemudian menyetujuinya. Akibatnya, hasil analisis masih belum menjelaskan secara detail terkait keseluruhan proses persetujuan antara Uni Eropa dengan Republik Ceko. Kemudian, sumber-sumber yang didapatkan oleh peneliti kebanyakan hanya bersumber dari website resmi Komisi Eropa dan sedikit dari jurnal maupun artikel. Meskipun demikian, dalam

penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada peneliti selanjutnya atau kepada para pembaca yang memiliki ketertarikan dan minat sesuai dengan analisis yang telah dilakukan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengambilan data secara lebih luas agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Almeida, Diana V., Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Héctor Herrera, Marcela V. Gonçalves, and Gert V. Hecken. 2023. "The "Greening" of Empire: The European Green Deal as the EU First Agenda." *Political Geography* 105 (August): 10. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102925>.
- Dennison, Susi, Rafael Loss, and Jenny Söderström. 2021. "Europe's Green Moment: How to Meet the Climate Challenge." Policy Brief. <https://ecfr.eu/publication/europes-green-moment-how-to-meet-the-climate-challenge/#how-to-harness-public-support-for-change>.
- De Pascale, Angelina, Giuseppe D. Vita, Carlo Giannetto, Giuseppe Ioppolo, Maurizio Lanfranchi, Michele Limosani, and Katarzyna Szopik-Depczyńska. 2023. "The circular economy implementation at European Union level. Past, present and future." *Journal of Cleaner Production* 423 (October): 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138658>.
- Eckert, Eva, and Oleksandra Kovalevska. 2021. "Sustainability in the European Union: Analyzing the Discourse of the European Green Deal." *Risk and Financial Management* 14, no. 2 (February): 22. <https://doi.org/10.3390/rjfm14020080>.
- Gökgöz, Fazıl, and Mustafa T. Güvercin. 2018. "Energy Security and Renewable Energy Efficiency in EU." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 96 (November): 226-239. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.07.046>.
- Haas, Ernst B. 1980. "why Collaborate?: Issue-Linkage and International Regimes." *World Politics* 32, no. 3 (April): 357-405. <https://doi.org/10.2307/2010109>.
- Hereu-Morales, Joan, Alba Segarra, and César Valderrama. 2024. "The European (Green?) Deal: A Systematic Analysis of Environmental Sustainability." *Sustainable Development* 32, no. 1 (February): 647-661. <https://doi.org/10.1002/sd.2671>.
- Ossewaarde, Marinus, and Roshnee Ossewaarde-Lowtoo. 2020. "The EU's Green Deal: A Third Alternative to Green Growth and Degrowth?" *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 23 (December): 1-15. <https://doi.org/10.3390/su12239825>.
- Poast, Paul. 2013. "Issue linkage and international cooperation: An empirical investigation." *Conflict Management and Peace Science* 30, no. 3 (June): 286-303. <https://doi.org/10.1177/0738894213484030>.
- Popov, Vyacheslav. 2019. "Renewable energy in Europe: key for climate objectives, but air pollution needs attention." European Environment Agency. <https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-key>.
- Sandri, Serena, Hussam Hussein, Nooh Alshyab, and Jacek Sagatowski. 2023. "The European Green Deal: Challenges and Opportunities for the Southern Mediterranean." *Mediterranean Politics*, 12. <https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2237295>.
- Schunz, Simon. 2022. "The 'European Green Deal'—a paradigm shift? Transformations in the European Union's sustainability meta-discourse." *Political Research Exchange* 4 (1): 23. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2022.2085121>.

Buku

Lindseth, Peter L. 2016. "Supranational Organizations." In *The Oxford Handbook of International Organizations*, edited by Jacob K. Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone, 152-170. N.p.: Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/law/9780199672202.003.0007>.

Laporan

BBC. 2019. "EU carbon neutrality: Leaders agree 2050 target without Poland." BBC.
<https://bbc.com/news/world-europe-50778001>.

Council of the European Union. 2021. "Public Sector Loan Facility to Support Just Climate Transition – Provisional Agreement Reached." Council of the EU.
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/26/public-sector-loan-facility-to-support-just-climate-transition-provisional-agreement-reached/>.

European Commission. 2019. "Farm to Fork Strategy - European Commission." Food Safety - European Commission. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en.

European Commission. 2020. "The Just Transition Mechanism - European Commission." European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en.

European Commission. 2020. "Finance and the Green Deal - European Commission." European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal_en.

European Commission. 2020. "Overview of sustainable finance - European Commission." Finance - European Commission. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en.

European Commission. 2020. "Recovery plan for Europe - European Commission." European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_en#main-elements-of-the-package.

European Commission. 2021. "Delivering the European Green Deal - European Commission." European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en.

European Commission. 2021. "NextGenerationEU Green Bonds - European Commission." European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds_en.

European Commission. 2022. "EU Cohesion Policy: €1.64 billion for a just climate transition in Czechia." European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5702.

European Commission. 2022. "State aid: Commission approves €1.2 billion Czech scheme to promote green district heating." European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7680.

European Commission. 2023. "Staatliche Beihilfen: EU-Kommission genehmigt tschechische Regelung im Umfang von 401 Mio. EUR." European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1214.

- European Commission. 2023. “Czechia’s Recovery and Resilience Plan.” European Commission. https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/country-pages/czechias-recovery-and-resilience-plan_en.
- European Commission. 2023. “State aid: Commission approves €2.5 billion Czech scheme to support the decarbonisation and energy efficiency of industrial processes to foster the transition to a net-zero economy.” European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4788.
- European Commission. 2023. “State aid: Commission approves €2.4 billion Czech scheme to support sustainable biomethane production.” European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3383.
- European Commission. 2024. “Commission approves State aid to support construction of nuclear power plant in Czechia.” European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2366.
- European Commission. 2024. “Commission approves €3.2 billion Czech State aid scheme to support high-efficiency combined heat and power generation.” European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2849.
- European Commission. 2024. “Energy and the Green Deal.” European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_en.
- European Commission. 2025. “A Clean Industrial Deal for competitiveness and decarbonisation in the EU.” Clean Industrial Deal. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_550.
- European Council. 2019. “European Green Deal.” Policies. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/>.
- European Council. 2019. “European Council conclusions, 12 December 2019.” Council of the EU and the European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/12/european-council-conclusions-12-december-2019/>.
- European Council. 2025. “2004 enlargement: facts and figures.” European Council. <https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/2004-enlargement-facts-and-figures>.
- European Trade Union Confederation. 2024. “EU loses almost a million manufacturing jobs in just 4 years.” European Trade Union Confederation. <https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-loses-almost-million-manufacturing-jobs-just-4-years>.
- European Union. 2020. “Czechia – EU country profile.” European Union. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries/czechia_en.
- European Union. 2023. “Key facts and figures.” European Union. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/facts-and-figures-european-union_en.
- Gáfriková, Eliška. 2024. “Mýty a fakta o Evropské unii: K čemu zavazuje Zelená dohoda?” *Deník.cz*, May 22, 2024. <https://www.denik.cz/cesko-a-eu/pravda-a-lzi-o-evropske-unii-green-deal-zelena-dohoda.html>.
- Greenpeace European Unit. 2022. “Taxonomy: Greenpeace takes legal action against the EU’s gas and nuclear greenwashing.” Greenpeace.

- <https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/46384/taxonomy-greenpeace-takes-legal-action-against-the-eus-gas-and-nuclear-greenwashing/>.
- International Monetary Fund. 2024. “Enhancing the Green Transition in Czech Republic.” *IMF Staff Country Reports* 2024, no. 029 (January): 12. <https://doi.org/10.5089/9798400266522.002>.
- Komunikace, Odbor. 2020. “The Green Deal Must Not Go at the Expense of the Czech Economy.” <https://www.mpo.gov.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/the-green-deal-must-not-go-at-the-expense-of-the-czech-economy--253162/>.
- Korinkova, Eva. 2024. “Tractors roll into downtown Prague as Czech farmers join protests.” Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/tractors-roll-into-downtown-prague-czech-farmers-join-protests-2024-02-19/>.
- McEnchroe, Thomas. 2019. “Czech PM claims success as EU states agree on plan to reach carbon neutrality by 2050.” Radio Prague Internacional. <https://english.radio.cz/czech-pm-claims-success-eu-states-agree-plan-reach-carbon-neutrality-2050-8112961>.
- Publications Office of the European Union. 2023. “Czechia and the European Green Deal : climate and energy targets in Czechia.” (May), 3. 10.2834/552387.
- Rankin, Jennifer. 2019. “European Green Deal to press ahead despite Polish targets opt-out.” Climate crisis. <https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/13/european-green-deal-to-press-ahead-despite-polish-targets-opt-out>.
- The Economist. 2025. “The Comeback of Andrej Babis.” The Economist. <https://www.economist.com/europe/2025/10/09/the-comeback-of-andrej-babis>.
- World Nuclear News. 2025. “KHNP sets out plans for USD18.6bn Czech nuclear project.” World Nuclear News. <https://www.world-nuclear-news.org/articles/khnp-sets-out-plans-for-usd186bn-czech-nuclear-project>.
- WWF. 2021. “Cleans jobs can replace coal jobs in European regions - WWF report.” WWF. <https://www.wwf.mg/?3222866/Clean-jobs-can-replace-coal-jobs-in-European-regions---WWF-report#>.
- Zachová, Aneta. 2025. “Survey: Czechs are the most pro-nuclear nation in Europe.” Euractiv. <https://www.euractiv.com/section/politics/news/survey-czechs-are-the-most-pro-nuclear-nation-in-europe/>.